

**EFEKTIVITAS KINERJA BPBD DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR ROB
DI GAMPONG PASIR KECAMATAN
JOHAN PAHLAWAN KABUPATEN ACEH BARAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
Memenuhi syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

AJA DELA HIKMAH

1705905010038



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH – ACEH BARAT**

2021



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH-ACEH BARAT**

Laman: www.utu.ac.id Email: fisip@utu.ac.id Kode Pos 23615

Meulaboh, 16 Agustus 2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara:

Nama : AJA DELA HIKMAH

Nim : 1705905010038

Dengan judul: **Efektivitas Kinerja BPBD Dalam Penanggulangan
Bencana Banjir Rob Di Gampong Pasir Kecamatan Johan
Pahlawan Kabupaten Aceh Barat**

Yang diajukan untuk memenuhi Sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh

Mengesahkan :

Pembimbing Utama,


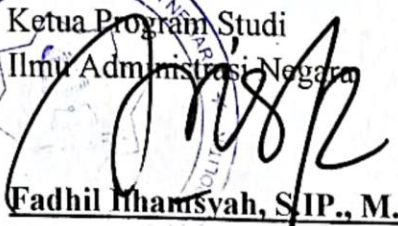

Nodi Marefanda, S.Pi., M.A.P

NIDN. 0002118903

Mengetahui:


Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Basri, SH., MII
NIP.196307131991021002


Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Fadhil Hamsyah, S.IP., M.Si
NIDN.0017109101



Mengetahui, 16 Agustus 2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara:

Nama : AJA DELA HIKMAH

Nim : 1705905010038

Dengan Judul : **Efektivitas Kinerja BPBD Dalam Penanggulangan
Bencana Banjir Rob Di Gampong Pasir Kecamatan Johan
Pahlawan Kabupaten Aceh Barat**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian pada tanggal 16 Agustus 2021
Menyetujui

Komisi ujian

- 1 Ketua : Nodi Marefanda, S.Pi., M.A.P
- 2 Anggota : Nellis Mardhiah, M.Sc
- 3 Anggota : Sudarman, M.Ag

Tanda tangan

Mengetahui
Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara,
Fadhil Ilhamsyah, S.IP, M.Si
NIDN.001710910

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AJA DELA HIKMAH

Nim : 1705905010038

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AJA DELA HIKMAH**

Nim : **1705905010038**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dipandang sebagai Tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar keserjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 16 Agustus 2021

Saya yang membuat pernyataan

Aja Dela Hikmah

1705905010038

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), di tambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering) nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan)kalimat allah. Sesungguhnya allah maha perkasa lagi maha bijaksana.” (Q.S Luqman :27)

Ya Allah....

Jadikanlah Kami Kaya Akan Ilmu, Muliakanlah Kami Dengan Ketekunan Dan Hiasilah Diri Kami Dengan Kesabaran, Sesungguhnya Allah Tidak Akan Menguji Seorang Hamba Di Luar Batas Kemampuannya Dan Mintalah Pertolongan-Nya Dengan Shalat Dan Sabar

Alhamdulillah.....

Dengan ridha-mu ya allah Amanah ini telah selesai, sebuah langkah usai sudah, Namun itu bukan akhir dari perjalananku, Melainkan awal dari sebuah perjalanan

*Ayah dan Mamakku Tercinta
(Said Ali dan Syarifah Aini)*

Terima Kasih atas

Do'a dan air mata di setiap sujud mu yang selalu mengiringi langkah ku serta ketulusanmu yang menguatkan hatiku untuk terus berusaha menggapai asa. Setiap butir keringatmu menyemangatkan ku untuk mewujudkan harapanmu. Kasih sayangmu sejukkkan relung hatiku. Kini harapanmu telah kugapai. Tumbuhkan tekad yang suci untuk s'lalu membahagiakanmu Terimakasih ku ucapkan sekali lagi atas segala kesabaranmu, kebaikanmu dan segala hal terbaik yang telah diberikan kepada putrimu.

Terimakasih kepada adikku tercinta Aja Hidayatul Saafah, Said Rahadian dan Aja Aisyah yang telah mendukung dan mendo'akan ku dalam menggapai tujuan seperti yang diharapkan, serta terimakasih kepada keluarga besar yang telah mendo'akan dan mendukung ku dari awal sampai akhir.

Ya allah, jadikanlah aku anak yang saleh, berbakti kepada orang tua, membanggakan orang tua, dan menjadi amal yang tak terputus bagi keduanya.

Dengan ridha allah ku persembahkan karya yang sederhana ini kepada keluargaku tercinta. Simpuh sujudku dan terimakasihku kepada yang tercinta ayahanda dan ibunda yang telah mendidik ku dengan penuh keikhlasan atas segala perhatian, pengertian, dan dukungannya

Aja Dela Hikmah

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi/Tugas Akhir yang berjudul “Efektifitas Kinerja BPBD dalam Penanggulangan Bencana Banjir Rob di Gampong Pasir Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat”. Dengan baik dan lancar sebagai Program Sarjana (SI) Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, Meulaboh.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi/tugas akhir ini tidak lepas dari berbagai kesulitan. Tetapi berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka kesulitan ini dapat diatasi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materil Kepada:

1. Ayah dan ibunda tercinta yang telah memberikan semangat, kasih sayang yang luar biasa kepada saya, memotivasi saya, dan pastinya dengan Do'A yang luar biasa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Jasman J Ma'ruf, SE., MBA selaku Rektor Universitas Teuku Umar.
3. Bapak Basri, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
4. Bapak Fadhil Ilhamsyah, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Adminitrasi Negara.
5. Bapak Nodi Marefanda, M.A.P selaku pembimbing yang telah memberikan waktunya untuk memberikan pengarahan dan koreksi serta bimbingan dalam skripsi ini sejak dari awal hingga selesai skripsi.

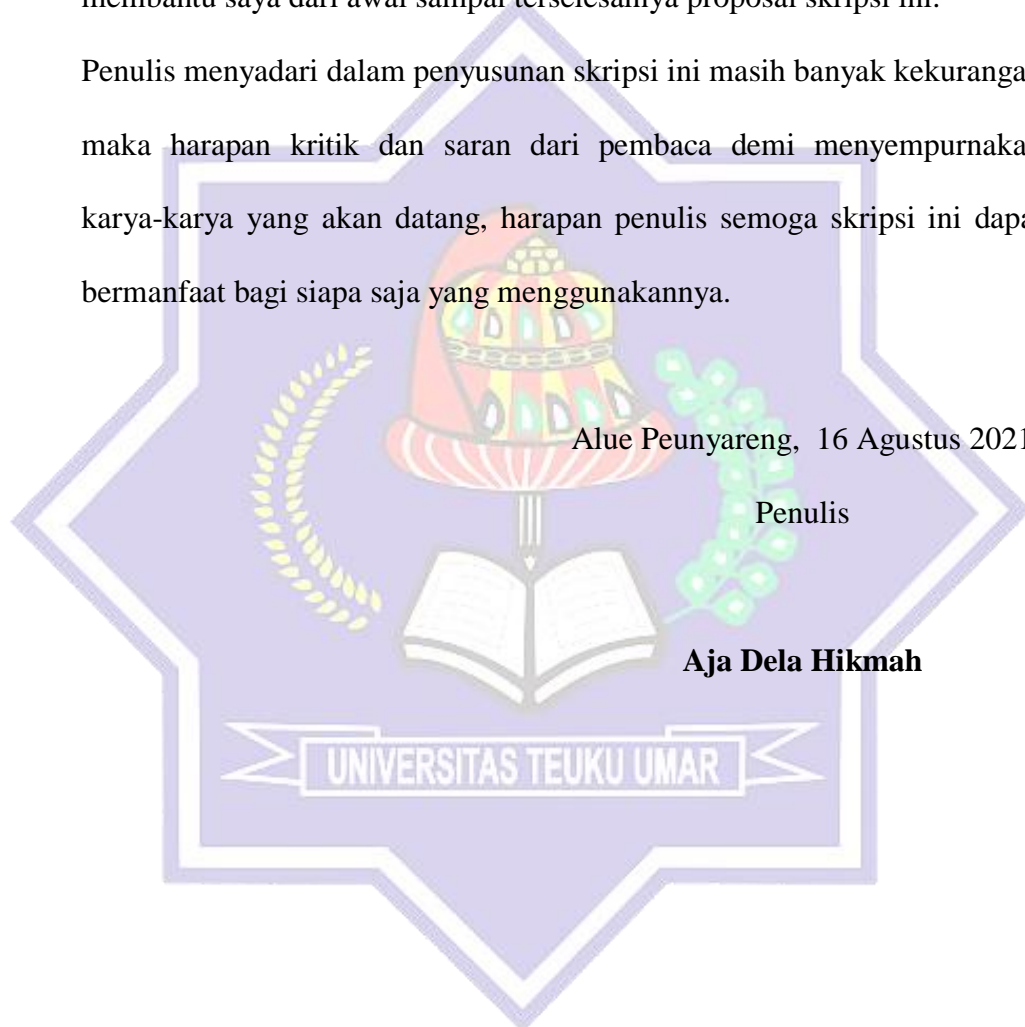
6. Para dosen dan staf Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
7. Sahabat-sahabat Jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2017, mahasiswa/I FISIP yang selalu bersama disaat kuliah.
8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu saya dari awal sampai terselesainya proposal skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan maka harapan kritik dan saran dari pembaca demi menyempurnakan karya-karya yang akan datang, harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang menggunakannya.

Alue Peunyareng, 16 Agustus 2021

Penulis

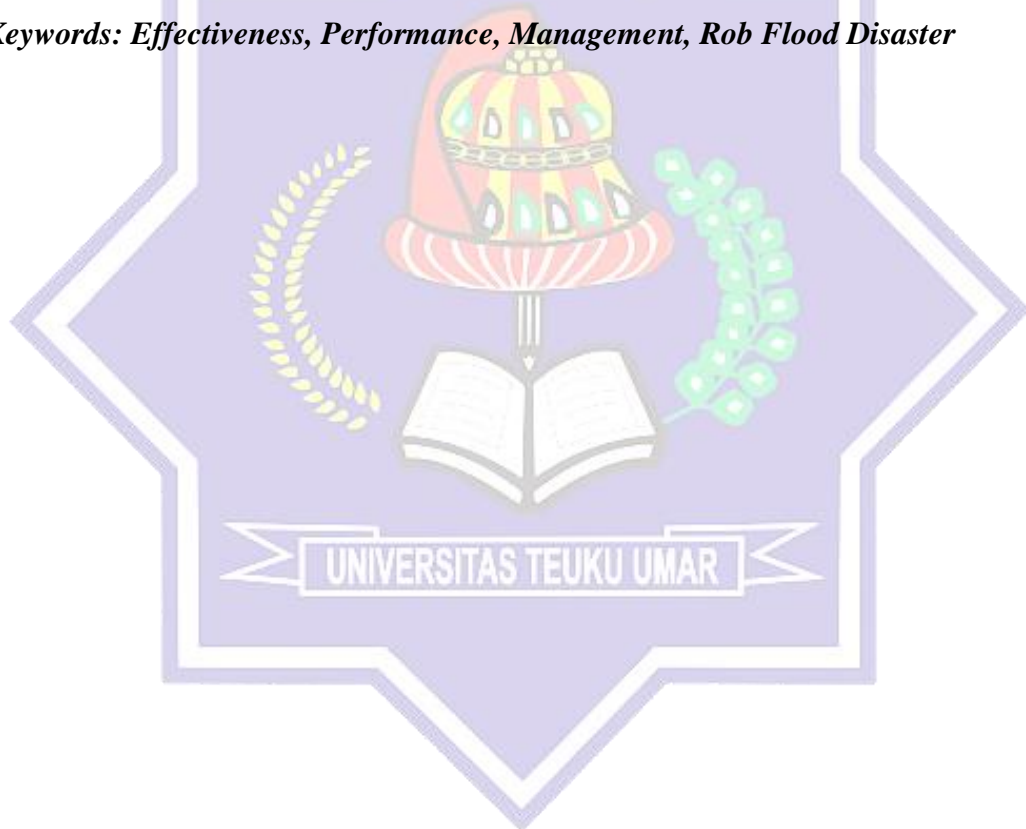
Aja Dela Hikmah



ABSTRACT

This study formulates the Effectiveness of BPBD Performance in West Aceh Regency in tackling the tidal flood disaster in Gampong Pasisir, Johan Pahlawan District, West Aceh Regency. This study uses a qualitative description method to detail in depth the effectiveness of BPBD performance in disaster management as well as obstacles and efforts that exist during the response process. The results showed that the effectiveness of BPBD performance was not optimal in tidal flood disaster management because the BPBD's duties and functions had not been carried out optimally, based on the process of disaster management stages in the form of pre-disaster, during emergency response, and in the post-disaster stage, this was caused by limited facilities and infrastructure. infrastructure during disaster response, to the difficulty of evacuating people because they do not want to leave their homes.

Keywords: *Effectiveness, Performance, Management, Rob Flood Disaster*



ABSTRAK

Penelitian ini merumuskan Efektivitas Kinerja BPBD Kabupaten Aceh Barat dalam penanggulangan bencana banjir rob yang ada di Gampong Pasir Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskripsi untuk merincikan secara mendalam mengenai Efektivitas Kinerja BPBD dalam penanggulangan bencana serta hambatan dan upaya yang ada selama proses penanggulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Kinerja BPBD belum optimal dalam penanggulangan bencana banjir rob dikarenakan belum terlaksananya tugas dan fungsi BPBD secara optimal, berdasarkan proses tahapan penanggulangan bencana berupa pra bencana, saat tanggap darurat, serta pada tahap pasca bencana, hal ini disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana pada saat tanggap bencana, hingga sulitnya untuk mengevakuasi masyarakat karena tidak mau meninggalkan rumah.

Kata Kunci : Efektivitas, Kinerja, Penanggulangan, Bencana Banjir Rob



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN	iii
LEMBARAN ORISINALITAS	iv
LEMBARAN PERSEMBAHAN	v
LEMBARAN KATA PENGANTAR	vi
LEMBARAN ABSTRAC	viii
LEMBARAN ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 latar Belakang	4
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Landasan Teori.....	9
2.2.1 Pengertian Efektivitas	9
2.2.2 Indikator Efektivitas	10
2.2.3 Pengertian Kinerja	11
2.2.4 Indikator Kinerja	11
2.2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja	12
2.2.6 Banjir Rob	15
2.2.7 Faktor-faktor Penyebab Banjir Rob	15
2.2.8 Dampak Banjir Rob	16
2.2.9 Konsep Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	16
2.2.10 Tugas dan Fungsi BPBD.....	17
2.2.11 Standar Pelayanan Minimum BPBD dalam Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana	18
2.3 Landasan Konseptual	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22
3.1 Metode Penelitian	22
3.2 Fokus Penelitian.....	22

3.3 Sumber Data.....	23
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.5 Teknik Penentuan Narasumber	25
3.6 Instrumen Penelitian	25
3.7 Teknik Analisis Data.....	26
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian	27
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	28
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	28
4.2 Gambaran Umum BPBD Kabupaten Aceh Barat	28
4.2.1 Visi dan Misi BPBD Kabupaten Aceh Barat	28
4.2.2 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Aceh Barat	30
4.2.3 Tugas dan Fungsi Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Barat	32
4.3 Hasil Penelitian	34
4.3.1 Efektivitas Kinerja BPBD Kabupaten Aceh Barat	34
4.3.2 Sumber Daya Pegawai BPBD Kabupaten Aceh Barat	34
4.3.3 Indikator Efektivitas Kinerja BPBD Kabupaten Aceh Barat.....	35
4.3.3.1 Efisiensi Dalam Pelayanan	35
4.3.3.2 Daya Tanggap Petugas	37
4.3.3.3 Sarana dan Prasarana	39
4.3.3.4 Semangat Kerja Sama dan Loyalitas Kelompok Kerja	43
4.3.3.5 Hubungan Antara Pimpinan dan Bawahan.....	44
4.3.3.6 Hambatan dan Upaya	45
BAB V PEMBAHASAN	47
5.1 Efektivitas BPBD dalam Penanggulangan Bencana Banjir Akibat Pasang Air Laut di Gampong Pasir Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat	47
5.1.1 Efisiensi Pelayanan	47
5.1.2 Daya Tanggap Petugas	48
5.1.3 Sarana dan Prasarana	51
5.1.4 Semangat Kerja Sama dan Loyalitas Kerja	52
5.1.5 Hubungan Antara Pimpinan dan Bawahan	53
5.2 Hambatan dan Upaya	53
5.2.1 Hambatan	54
5.2.2 Upaya	55
BAB VI PENUTUP	54
6.1 Kesimpulan	54
6.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Peristiwa Bencana di Provinsi Aceh Tahun 2010-2020	1
Tabel 3.1 Narasumber Penelitian	25
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	28
Tabel 4.1 Daftar Aset BPBD Aceh Barat untuk Penanggulangan Banjir	40



DAFTAR GAMBAR

5.1 Korelasi Penanggulangan Pra-Bencana, Saat Terjadi Bencana, dan Pasca Bencana.....	49
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman wawancara

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3. SK Pembimbing

Lampiran 4. Surat Izin Permohonan Penelitian

Lampiran 5. Surat Pernyataan Selesai Penelitian

Lampiran 6. Biodata Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana merupakan rangkaian peristiwa yang mengakibatkan dampak kerugian bagi alam serta makhluk hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 bencana adalah peristiwa yang mengganggu kehidupan masyarakat karena disebabkan oleh faktor alam seperti bencana alam berupa tsunami, gempa bumi dan banjir atau faktor non alam yang disebabkan oleh gagalnya teknologi, epidemi dan wabah penyakit maupun faktor yang terjadi akibat manusia itu sendiri seperti konflik sosial. Dari beberapa jenis bencana tersebut bencana alam merupakan peristiwa yang sering terjadi di Indonesia, dikarenakan wilayah Indonesia terletak di daerah yang beriklim tropis dengan dua musim yaitu panas dan hujan serta adanya perubahan cuaca, suhu dan arah angin yang ekstrim sehingga akan rentan terdampak bencana.

Daerah dengan indeks bencana alam tertinggi adalah Provinsi Aceh (BNPB, 2020). Jumlah peristiwa bencana yang terjadi di provinsi Aceh berdasarkan data informasi bencana Indonesia (DIBI) tahun 2015 ialah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Peristiwa Bencana di Provinsi Aceh Tahun 2010-2020

NO	KEJADIAN	JUMLAH KEJADIAN	MENINGGAL	LUKA-LUKA	HILANG	MENGUNGSI	RUMAH RUSAK BERAT	RUMAH RUSAK RINGAN	KERUSAKAN LAHAN (HA)
1	Banjir	215	142	545	65	659.499	3.594	8.741	80.219
2	Banjir Bandang	13	60	38	32	99.724	17.740	23.494	180
3	Gelombang ekstrim dan abrasi	21	2	2	0	567	144	30	0
4	Gempa Bumi	27	245	2.920	0	135.227	12.069	15.422	0
5	Tsunami	30	166.551	1.138	6.220	436.180	323.036	96.609	58.087
6	Kebakaran Hutan dan lahan	4	0	0	0	800	0	0	344
7	Kekeringan	62	0	0	0	0	0	0	73.622
8	Epidemi dan Wabah Penyakit	3	139	42	0	0	0	0	0
9	letusan Gunung Api	1	0	0	0	0	0	3.859	0
10	Cuaca Ekstrim	50	1	101	1	3.045	641	1.040	86
11	Tanah Longsor	28	20	12	4	11.525	158	218	286
TOTAL KEJADIAN		454	167.160	4.798	6.322	11.346.567	375.382	149.413	212.824

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Aceh (2015)

Peristiwa bencana pada tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa banjir merupakan bencana alam yang sering melanda wilayah Provinsi Aceh, termasuk Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Banjir yang terjadi di daerah tersebut sebagian besar bukan berasal dari aliran sungai melainkan akibat gelombang pasang air laut, fenomena alam ini dikenal dengan istilah rob. Rob merupakan banjir akibat pasang surut air laut yang menggenangi lahan/kawasan ke daerah lebih rendah dari permukaan air laut rata-rata (Nurhayati, 2012).

Wilayah selatan Kecamatan Johan Pahlawan rawan terhadap bencana banjir karena kondisi tanah yang rendah dari permukaan air laut mengakibatkan banjir dengan mudah masuk jauh sampai kedaratan, sehingga dapat merugikan warga yang tinggal di daerah tersebut. Terdapat tiga desa dengan dampak tertinggi mengalami bencana banjir rob seperti Gampong Pasir, Suak Indrapuri dan Ujong Kalak. Akan tetapi dampak terbesar dirasakan oleh gampong pasir dikarenakan wilayah gampong yang sangat dekat dengan bibir pantai sehingga membuat air laut dengan mudah langsung masuk ke daratan dan mengenai pemukiman penduduk. Setiap tahunnya banjir rob yang melanda daerah tersebut terus mengalami peningkatan, pada tahun 2018 banjir rob yang diakibatkan oleh gelombang pasang tinggi membuat rumah warga tergenang air laut, menumpuknya sampah hingga terhambatnya jalur transportasi akibat endapan pasir yang di bawa oleh gelombang pasang (Cendana News, 2018).

Banjir rob juga terjadi pada tahun 2019, dampak yang diakibatkan membuat perumahan warga tergenang air laut serta menimbulkan endapan pasir setebal 1 meter karena adanya ketinggian ombak mencapai hingga 2 meter, akibatnya tanggul yang dibangun juga mengalami kerusakan karena tidak cukup

kuat dalam menahan terjangan ombak, sehingga berdampak terhadap aktivitas jalur transportasi serta perekonomian warga (AntaraNews, 2019)

Pada tahun 2020 banjir rob melanda 112 KK, 42 rumah warga mengalami kerusakan parah akibat terjangan gelombang pasang yang masuk ke daratan, sebagian badan jalan terendam akibat tingginya genangan air laut berdampak terhadap lumpuhnya jalur transportasi sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan (CNN, 2020). Dilihat dari banyaknya kerugian akibat banjir yang terus melanda daerah tersebut maka penanganan harus dilakukan dengan serius, karena dapat mengganggu proses pembangunan serta menghambat perekonomian warga.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Barat sebagai lembaga daerah yang bergerak dalam bidang penanggulangan bencana alam dituntut untuk melakukan penanggulangan sebaik mungkin, sehingga perlu dilihat efektivitas kinerja BPBD dalam proses penanggulangan bencana guna menekan jumlah korban serta kerugian akibat dampak banjir rob tersebut. BPBD Aceh Barat sudah berupaya melakukan tindakan penanggulangan, namun tindakan yang telah dilakukan dianggap belum maksimal juga belum optimal dikarenakan banyaknya masyarakat yang masih mengeluh akan kesiapsiagaan BPBD terhadap penanggulangan bencana banjir rob.

Kondisi yang demikian bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 12 Tentang Penanggulangan Bencana yang menyebutkan bahwa BPBD harus memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup: pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara. Minimnya peran BPBD Aceh Barat akan beresiko kepada tingginya tingkat kerugian yang

akan dialami oleh korban bencana tersebut, sehingga perlu dilihat sejauh mana efektivitas kinerja BPBD Aceh Barat dalam penanggulangan bencana banjir tersebut. Maka dari itu dibutuhkan kinerja yang baik dari BPBD agar dapat menanggulangi bencana dengan baik dan cepat

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Efektivitas kinerja BPBD dalam Penanggulangan Bencana Banjir Rob di Gampong Pasir Kecamatan Johan Pahlawan kabupaten Aceh Barat”**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan hasil penjelasan pada latar belakang diatas, maka dapat di ambil rumusan masalah yang akan di kaji pada penelitian ini.

1. Bagaimana efektifitas kinerja BPBD Kabupaten Aceh Barat dalam penanggulangan banjir rob yang terjadi di kecamatan Johan Pahlawan?
2. Apa saja faktor penghambat serta upaya yang dihadapi oleh BPBD Kabupaten Aceh Barat dalam penanggulangan banjir rob yang terjadi di kecamatan Johan Pahlawan?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui efektivitas kinerja BPBD Kabupaten Aceh Barat dalam penanggulangan bencana banjir pasang air laut yang terjadi di gampong Pasir Kecamatan Johan Pahlawan
2. Untuk mengetahui Apa saja faktor penghambat dan upaya yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Aceh Barat dalam penanggulangan

bencana banjir akibat pasang air laut yang terjadi digampong Pasir
Kecamatan Johan Pahlawan

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini meliputi :

a. Secara Teoritis

Dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian yang sejenis untuk penelitian selanjutnya, diharapkan bisa menambah kemampuan berfikir secara ilmiah, serta dapat dijadikan rekomendasi sebagai bahan perbaikan untuk pemecahan masalah BPBD Aceh Barat maupun masyarakat tentang penanganan bencana banjir akibat pasang air laut secara baik dan benar.

b. Secara praktis

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi pemikiran bagi pemerintah Kabupaten Aceh Barat terkhusus kepada BPBD dalam menjalankan kinerja serta tugas terhadap masyarakat terkait penanggulangan bencana Banjir akibat pasang air laut di gampong pasir Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, juga dapat berfungsi sebagai bahan bacaan serta acuan dan informasi untuk pihak-pihak yang memerlukan penelitian ini sebagai bahan referensi.

1.5 Sistematika penulisan

Dalam memberikan gambaran yang jelas terhadap penulisan skripsi ini, maka penulis dapat jabarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab I ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab II ini terdiri dari adanya penelitian terdahulu yang diambil sebagai referensi, landasan dan juga konsep teori yang berkaitan dan mendukung dengan penelitian ini

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab III ini terdapat metode penelitian, sumber-sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penentuan informan, instrument penelitian, serta teknik analisis data dan uji kredibilitas data.

BAB IV : Hasil Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang hasil dari penelitian selama proses memperoleh data lapangan baik dokumentasi dan juga jawaban tertulis dari hasil wawancara informan

BAB V : Pembahasan

Bab V ini berisi terkait hasil serta uraian penelitian dari perolah data yang didapatkan ketika melakukan penelitian terdahulu

BAB VI : Kesimpulan dan Saran

Bab VI terdiri atas kesimpulan dari penelitian beserta saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian terdahulu

Penelitian terkait dengan bencana banjir akibat pasang air laut merupakan penelitian yang sudah pernah diteliti sebelumnya namun dalam perspektif yang berbeda. Maka dengan itu penulis mengambil rujukan dan referensi dari berbagai penelitian terdahulu sebagai bahan untuk dijadikan perbandingan serta pelengkap untuk penulisan skripsi yang lebih baik.

Anwar Sadat, (2016) “Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengurangan Resiko Bencana Di Kota Baubau” penelitian ini mengkaji tentang bagaimana peran dari BPBD Kota Baubau dalam pengurangan resiko bencana. Adapun hasil dari penelitian ini BPBD Kota Baubau dianggap mencapai hasil yang memuaskan, dari segi kemampuan aparat BPBD kota Baubau mampu mengenali kebutuhan serta tahap-tahap dalam mitigasi bencana sebagai sebuah rangkaian penanggulangan bencana.

Rismawati, Jaelan Usman, Adam Ma'ruf (2015) “Peran pemerintah dalam penanggulangan banjir di kecamatan manggala kota makasar”. Adapun penelitian ini mengkaji tentang peran pemerintah dalam penanggulangan banjir yang ada di kecamatan manggala kota makasar, serta upaya yang dilakukan dengan melakukan koordinasi dan memberikan fasilitas dalam menanggulangi banjir serta dampak yang ditimbulkan. Selanjutnya penelitian yang di teliti oleh Erna Pandi, Nurhayati, (2012) yang berjudul “Dampak rob terhadap aktivitas pendidikan dan mata pencaharian di kelurahan bandarharjo kecamatan semarang utara”. Adapun hasil penelitian ini ialah adanya gangguan aktivitas pendidikan dan mata

pencaharian masyarakat terutama yang dirasakan guru dan pelajar terhambat karena genangan air sehingga sering terlambat, serta jadwal KBM yang terganggu akibat tinggi genangan air yang mencapai 20-60 cm, dan lama genangan hingga 4-8 jam.

Selain itu, penulis juga merujuk kepada penelitian yang diteliti Nova Ihksyan, Chatarina Muryani, Peduk Rintayati, (2017) membahas tentang Analisis sebaran, dampak dan adaptasi masyarakat terhadap banjir rob dikecamatan semarang timur dan kecamatan gayamsari kota semarang. Hasil penelitian adalah sebaran banjir serta dampak banjir yang terjadi juga lebih mengkaji terhadap partisipasi dan cara adaptasi masyarakat, dengan cara meninggikan rumah, membangun talut, membuat penghalang dipintu sebagai upaya masyarakat untuk dijadikan pertahanan sebelum banjir datang.

Evaluasi proses kebijakan penanganan banjir rob di kota semarang oleh pemerintah kota semarang Agni Musa Hakam, 2018. Adapun hasil dari penelitian ini ialah evaluasi program yang dilakukan belum terselesaikan dengan baik, seperti masih belum teroptimalisasi kapasitas saluran air dengan baik, juga belum maksimalnya upaya untuk menghentikan penurunan tanah.

Mitigasi bencana banjir rob di Jakarta utara Rangga Chandra K, Rina Dewi Supriharjo, (2013). Hasil dari penelitian ini ialah analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kerentanan bencana banjir rob, serta analisis dalam melihat tingkat kerentanan, analisis tingkat bahaya bencana banjir rob, tingkat kemampuan bahaya banjir rob serta analisis zona risiko bencana yang terjadi di Jakarta Utara serta didapatkan hasil kecamatan dengan resiko paling besar terkena

banjir rob ialah Kecamatan Cilincing, Kecamatan Koja dan Kecamatan Tajung Priok.

Banyak penelitian sebelumnya telah meneliti terkait bencana banjir rob, namun pada penelitian ini peneliti tetap menghadirkan perbedaan dari penelitian yang telah diteliti sebelumnya. Perbedaan antara penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada fokus penelitian terhadap aspek peran dari pemerintah dalam penanggulangan bencana. Jika sebelumnya telah dilakukan penelitian yang berfokus terhadap peran namun pembahasan yang diberikan berupa peran dari aspek pemerintahan dalam memberikan program serta kebijakan, maka dalam penelitian ini peneliti menfokuskan kepada efektif kinerja dari lembaga yang terjun langsung dalam proses penyelenggaraan penanggulangan yaitu BPBD Kabupaten Aceh Barat dalam penanggulangan sebelum terjadinya bencana guna mengurangi dampak bencana yang ditimbulkan kedepannya sehingga menjadikan penelitian ini menarik untuk di kaji karena adanya pembaharuan gagasan yang diteliti.

2.2 landasan Teori

2.2.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2017:134) Efektifitas adalah ukuran pencapaian tujuan dari sebuah organisasi dapat dilihat dari tingkat berhasil atau tidak nya tujuan yang dijalankan oleh sebuah organisasi tersebut. Apabila tujuan yang di jalankan berhasil maka organisasi tersebut dapat dikatakan berjalan dengan efektif. Adapun menurut Permata Weshia (1992:148) Efektifitas adalah suatu keadaan atau berhasil dan mempunya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk dapat memberikan guna yang diharapkan.

Menurut Richard M. Steers (1980:1) Efektivitas berasal dari kata efektif, dapat dikatakan efektif apabila pekerjaan yang dilakukan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah diatur. Efektivitas menurut Bedjo Siswanto (1990:62) berarti melakukan pekerjaan yang benar. Menurut Andrian (2001:12) efektivitas adalah pekerjaan yang dijalankan dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pekerjaan tersebut, dengan memberdayakan semua sumber daya manusia ataupun seluruh potensi sumber daya yang ada.

Sehubungan dengan penjelasan terkait efektivitas tersebut maka efektivitas menggambarkan seluruh input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas dan waktu) yang telah dicapai. Oleh karena itu dikatakan efektif suatu program organisasi apabila tujuan dan sasaran yang ingin dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan dapat memberikan dampak, hasil serta manfaat yang diinginkan

2.2.2 Indikator efektivitas

Terdapat beberapa alat ukur suatu efektivitas dengan menggunakan indikator menurut Martani dan Lubis (1987:55) berdasarkan pendekatan proses (process approach) yaitu sebagai berikut :

- a. Efisiensi dalam pelayanan
- b. Daya tanggap petugas
- c. Sarana dan prasarana
- d. Semangat kerjasama dan loyalitas kelompok kerja
- e. Hubungan antara pimpinan dan bawahan

2.2.3 Pengertian kinerja

Menurut (Suhendi, 2012:23) kinerja merupakan sesuatu yang digunakan untuk memantau produktifitas kerja sumber daya manusia, baik yang berfokus pada produksi barang, jasa, maupun pelayanan. Untuk mencapai kinerja yang profesional, hal-hal seperti kesukarelaan, pengembangan diri pribadi, kerja sama yang saling menguntungkan, serta partisipasi seutuhnya perlu untuk dikembangkan.

2.2.4 Indikator kinerja

Terdapat lima Indikator untuk mengukur kinerja menurut (Robbins, 2006:260) ialah sebagai berikut :

1. Kualitas

Kualitas diukur dari kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh serta ketrampilan, kesempurnaan tugas, dan kemampuan tugas.

2. Kuantitas

Merupakan jumlah yang siklus aktivitas yang diselesaikan serta jumlah unit yang dihasilkan.

3. Ketepatan waktu

Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan suatu pekerjaan pada awal waktu yang telah dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi serta hasil output untuk memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktifitas yang lain.

4. Efektivitas

Efektivitas merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) mampu di maksimalkan dengan tujuan menaikkan hasil setiap unit dalam penggunaan sumber daya.

5. Kemandirian

Merupakan tingkat seorang karyawan dimana nantinya dapat menjalankan fungsi kerjanya komitmen kerja, dengan instansi tanggung jawab karyawan terhadap kantor.

2.2.5 Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja

1. Efektifitas dan Efisiensi

Apabila tujuan yang diinginkan akhirnya tercapai, boleh dikatakan bahwa kegiatan tersebut telah efektif tetapi apabila akibat yang tidak dicari kegiatan yang penting sehingga mengakibatkan kepuasan walaupun efektif dinamakan tidak efisien. Sebaliknya, bila akibat yang dicari-cari tidak penting maka kegiatan tersebut efisien (Prawirosentono, 1999:27)

A. Otoritas (wewenang)

Rosentono, (1999:27) otoritas adalah perintah dari suatu komunikasi dalam suatu organisasi formal yang dimiliki seorang anggota organisasi terhadap yang lain untuk melakukan kegiatan sesuai dengan kontribusinya. perintah yang dibeikan mengatakan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan dalam organisasi tersebut.

B. Disiplin

Disiplin adalah taat kepada peraturan dan hukum yang berlaku Prawirosentono, (1999:27) dikatakan disiplin karyawan adalah

kegiatan yang bersangkutan dalam menghormati perjanjian kerja dengan organisasi dimana dia bekerja.

C. Inisiatif

Yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreatifitas dalam membentuk suatu ide, dalam merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi. (Prawirosentono, 1999:27)

Adapun menurut Armstrong ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu:

a. Faktor individu (*personal factors*)

Faktor ini berkaitan dengan keahlian, komitmen, motivasi dan lainnya.

b. Faktor kepemimpinan (*Leadership factors*)

Kepemimpinan juga berkaitan dengan kualitas serta dukungan dan pengarahan yang diberikan oleh pimpinan, manajer.

c. Faktor kelompok atau rekan kerja (*team factors*)

Hal tersebut berkaitan dengan dukungan oleh rekan kerja

d. Faktor sistem (*system factors*)

Hal ini berkaitan dengan sistem atau metode kerja yang diterapkan dan disediakan oleh organisasi. Fasilitas yang bisa diberikan dengan cara memberikan motivasi. Motivasi kerja diberikan sebagai dorongan agar karyawan mampu melakukan kegiatan atau tugas dengan sebaik-baiknya.

Motivasi juga bisa diartikan sebagai suatu sikap pimpinan atau karyawan terhadap situasi kerja di lingkungan organisasi mereka, mampu bersikap positif terhadap situasi kerja.

e. Faktor situasi (*contextual/situation factors*)

Situasi berkaitan dengan perubahan dan tekanan yang ada di lingkungan kerja, baik internal maupun eksternal. Lingkungan menentukan tuntutan organisasi serta mempengaruhi pelaksanaan kinerja karyawan terhadap produktivitas organisasi, menentukan siapa yang memiliki tanggung jawab penilaian.

Untuk menuntut kemampuan kerja karyawan sebuah organisasi dapat menetapkan kriteria ataupun standar kinerja. Yang paling umum kriteria penilaian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Sifat

Sifat karyawan seperti sikap penampilan adalah dasar untuk evaluasi. Namun dari banyak kualitas umum yang digunakan bersifat subjektif dan bisa jadi tidak berhubungan dengan pekerjaan. Pada saat yang sama terdapat sifat tertentu dapat mempengaruhi kinerja pekerjaan dan apabila hubungan ini terbukti maka manfaatnya dalam penilaian bisa dianggap tepat.

b. Perilaku

Apabila tugas seseorang sulit ditentukan, organisasi dapat mengevaluasi perilaku orang tersebut yang berhubungan dengan tugas. Seperti contoh yang paling tepat untuk di evaluasi dari seorang manajer adalah gaya kepemimpinan.

c. Kompetensi

Berupa ketrampilan, luas nya pengetahuan, sifat, dan perilaku yang berkaitan antar pribadi.

d. Pencapaian tujuan

Capaian tujuan menjadi faktor yang tepat untuk dievaluasi. Hasil yang ingin dicapai mampu dikendalikan oleh individu atau tim dan hasil-hasil yang didapat haruslah mengarah terhadap kesuksesan perusahaan.

e. Potensi perbaikan

Perusahaan harus berfokus kepada masa depan, dengan cara menjadikan masa lalu sebagai bahan perbaikan sebagai bahan untuk mengembangkan karyawan dalam proses tersebut, untuk mencapai tujuan perusahaan.

2.2.6 Banjir rob

Rob adalah banjir yang terjadi akibat pasang air laut yang menggenangi area lahan/kawasan yang lebih rendah dari pada permukaan air laut. Adapun menurut (Sunarto, 2003) Banjir pasang air laut (rob) ialah adanya pola fluktuasi permukaan air laut yang dipengaruhi oleh adanya gaya tarik-menarik dari benda-benda angkasa, terutama oleh bulan dan matahari terhadap massa (berat jenis) air laut yang ada di bumi.

2.2.7 Faktor-faktor penyebab banjir rob

Banjir rob yang melanda daerah yang terdapat di pinggiran laut atau pantai ini disebabkan oleh :

- a. Lebih rendahnya permukaan tanah dari pada muka pasang air laut
- b. Semakin tingginya pasang air laut. Tingginya pasang bukan hanya efek dari pemanasan global, tetapi karena adanya amblesan tanah (*subsidence*). *Subsidence* terjadi karena konsolidasi tanah yang belum mantap, kurangnya resapan air dan pengambilan air tanah yang terus

dilakukan secara berlebihan. Disamping itu, adanya pengaruh arus gelombang yang sejajar dengan pantai mengakibatkan pendangkalan muara yang dapat mengurangi kapasitas penyaluran air sehingga akan memperparah luapan banjir disekitarnya.

2.2.8 Dampak banjir rob

Bencana rob membuat lingkungan menjadi tidak sehat, lembab serta kotor, karena rob datang membawa sampah serta kotoran yang kemudian tertinggal di selokan sungai-sungai kecil, bahkan di dalam rumah. Akibatnya banyak menjadi tempat bagi sarang nyamuk sehingga akan menimbulkan dampak bencana lain bagi kesehatan masyarakat.

2.2.9 Konsep Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Menurut Undang-Undang Pasal 18 No 24 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di kabupaten/kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai latar belakang dan berbagai permasalahan sebagai acuan dalam menentukan tinjauan pustaka mengenai upaya BPBD dalam Penanggulangan bencana Banjir Rob. Mengingat penelitian ini hanya berfokus pada efektivitas kinerja BPBD Kabupaten Aceh Barat dalam penanggulangan Banjir Rob, maka dapat dipetakan bahwa kajian pustaka akan berfokus pada apa itu Banjir Rob, apa itu Badan Penanggulangan Bencana, dan efektivitas kinerja dari BPBD Aceh Barat dalam penanggulangan

pada saat sebelum terjadinya bencana, pada saat terjadinya bencana dan pasca bencana.

2.2.10 Tugas dan fungsi BPBD

BPBD merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah pada bidang penanggulangan bencana, yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. BPBD sebagaimana yang dimaksud mempunyai tugas :

1. Menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta konstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi, serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpul dan penyaluran uang dan barangm serta mempertanggung jawabkan penggunaannya;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, BPBD mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.11 Standar Pelayanan Minimum BPBD dalam Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana

Standar pelayanan merupakan ketentuan terkait jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan tugas dan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Adapun langkah pelayanan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yaitu:

1. Penyusunan rencana penanggulangan bencana
2. Membuat rencana kontijensi
3. Pelatihan pencegahan serta mitigasi
 - a.) Pelatihan penanggulangan bagi aparatur
 - b.) Pelatihan penanggulangan bagi Warga Negara
4. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
 - a.) Simulasi dalam ruangan
 - b.) Gladi lapangan
5. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana

- a.) Koordinasi pemantapan kesiapsiagaan terhadap bencana
 - b.) Penyediaan sarana dan prasarana
 - c.) Penyediaan layanan pesan singkat secara *broadcast*
 - d.) Penyediaan obat-obatan dan vaksin
 - e.) Tatalaksana/pengobatan dan vaksinasi
 - f.) Penyediaan peralatan kesehatan
 - g.) Peralatan laboratorium
 - h.) Penyediaan peralatan biosekuriti
 - i.) Sarana dan prasarana berupa alat komunikasi dan sistem peringatan dini kebencanaan berbasis masyarakat
6. Penyediaan peralatan perlindungan penyelamatan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Tahapan dalam manajemen bencana pada saat sebelum kejadian atau pra bencana meliputi (kesiagaan, peringatan dini, dan mitigasi), tanggap darurat dan pasca bencana/pemulihan (rehabilitas, rekonstruksi).

a. Pra bencana

- 1.) Kesiagaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana melalui pengelompokan serta melalui langkah yang tepat dan berdaya guna. Membangun kesiapsiagaan merupakan unsur yang penting, namun tidak mudah dilakukan karena perbedaan budaya, serta menyangkut sikap mental dan juga disiplin masyarakat. Kesiagaan adalah tahap yang paling strategis dimana akan sangat menentukan ketahanan masyarakat dalam menghadapi datangnya bencana.

2.) Peringatan Dini. Langkah selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah sebelum bencana itu terjadi adalah adanya peringatan dini. Langkah ini perlu karena dapat memberi peringatan kepada masyarakat pada saat akan terjadi bencana

3.) Mitigasi Bencana. Mitigasi bencana adalah langkah untuk mencegah atau mengurangi efek yang ditimbulkan dari suatu bencana. Menurut peraturan pemerintah (PP) No.21 tahun 2008, mitigasi bencana adalah rangkaian upaya untuk mengurangi resiko terjadinya bencana, baik melalui pembangunan besifat fisik maupun penyadaran dan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana

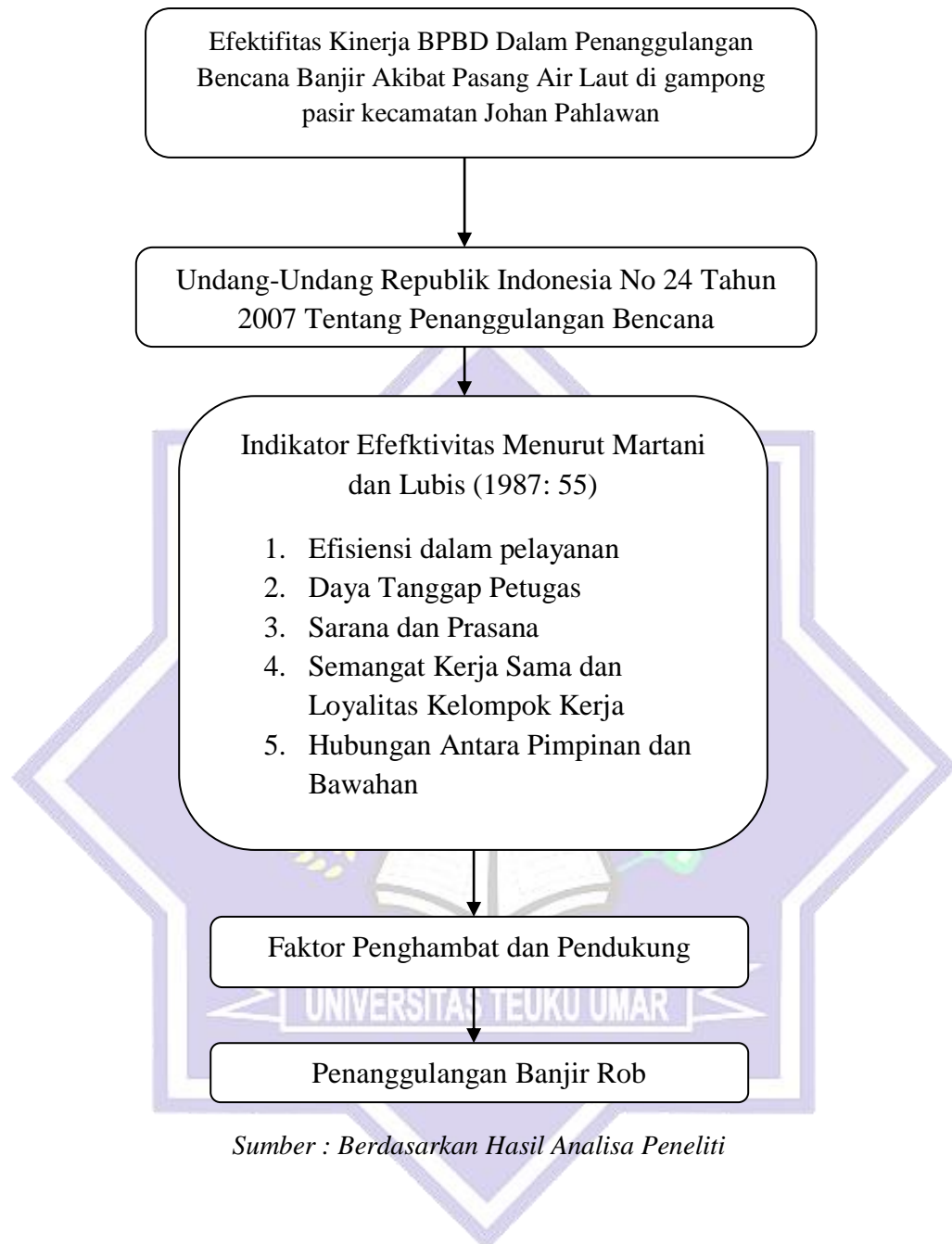
b. Tanggap darurat

Kegiatan ini adalah penanganan yang dilakukan ketika bencana melanda, tujuannya adalah menyelamatkan korban manusia dan harta benda. Meliputi kegiatan evakuasi korban ke tempat penampungan sementara, penyelenggaraan dapur umum, penyaluran bantuan, baik dalam bentuk pangan, obat-obatan maupun uang yang diberikan sebagai modal awal hidup pasca bencana.

c. Pasca Bencana (Pemulihan/recover)

Pemberian bantuan kemanusiaan, rehabilitasi dan rekonstruksi adalah bentuk kegiatan yang dilaksanakan pasca terjadinya bencana. Memulihkan kegiatan normal dan memulihkan infrastruktur fisik serta pelayanan masyarakat, pembangunan tempat tinggal sementara, penyebaran informasi publik, kesehatan pendidikan dan keselamatan, serta program konseling dan studi mengenai dampak ekonomi yang ditimbulkan.

2.3 Landasan Konseptual



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan ialah metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu kondisi objek yang bersifat alamiah, dimana seorang peneliti merupakan instrument dalam penelitian, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis datanya bersifat induktif, dan hasil akhir penelitian kualitatif lebih kepada menekankan makna daripada generalisasi (Afifuddin, 2009:57). Menurut (Poerwandari, 2005) penelitian kualitatif menghasilkan dan juga mengolah data yang bersifat deskriptif, seperti wawancara dan observasi. Serta menurut (Hamid Darmadi, 2013:186) Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang dapat menggambarkan dan menginterpretasi hasil objek penelitian sesuai dengan data apa adanya.

Landasan digunakannya metode ini adalah karena peneliti ingin mengetahui langsung tentang fenomena yang ada dan dalam kondisi alamiah, disamping itu juga karena peneliti ingin langsung terjun ke lapangan bersama dengan objek penelitian sehingga jenis penelitian kualitatif deskriptif kiranya lebih tepat untuk digunakan.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan penjelasan dari kerangka berfikir. Adapun dalam pengukuran efektivitas dalam penelitian ini dengan pengukuran yang dikemukakan oleh (Martani dan Lubis, 1987:55), bahwa ada 3 pendekatan pengukuran efektivitas, yakni pendekatan sumber (resource approach), pendekatan

sasaran (goal approach), dan pendekatan Proses (process approach). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan Proses (process approach) yang terlebih dahulu di tentukan indikator nya sebagai berikut:

- a. Efisiensi dalam Pelayanan
- b. Daya tanggap petugas
- c. Sarana dan Prasarana
- d. Semangat kerjasama dan loyalitas kelompok kerja
- e. Hubungan antara pimpinan dan bawahan

3.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh dan memiliki kejelasan tentang bagaimana data tersebut diambil serta bagaimana data tersebut diolah. Menurut Suharsimi Arikunto (2013:172) sumber data yang dimaksud dalam suatu penelitian ialah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Sedangkan menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2013:142) “Sumber data merupakan faktor terpenting yang menjadi suatu pertimbangan didalam penentuan metode pengumpulan data disamping dari jenis data yang telah dibuat dimuka”.

Maka dari beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa sumber data adalah faktor yang sangat penting dalam penentuan metode pengumpulan data dan untuk mengetahui dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data terdiri dari:

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasanya dilakukan oleh peneliti (Husein Umar, 2013:42).

2. Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang didapat secara tidak langsung melalui media perantara, atau bisa dikatakan sumber diperoleh dan dicatatoleh pihak lain (Nur Indrianto dan Bambang Supomo, 2013:43)

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Maman Abdulrahman dan Sambas Ali (2012:84) teknik pengumpulan data ialah cara yang digunakan oleh peneliti sebagai teknik dalam mengumpulkan data.

1. Observasi

Menurut Harbanu Pasolong (2013:131) observasi merupakan pengamatan secara langsung dengan cara sistematis terhadap gejala yang hendak diteliti. Dengan menggunakan metode ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung mengenai kegiatan atau aktivitas-aktivitas serta kondisi yang terjadi di lokasi penelitian.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan Tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung secara bertatap muka (*personal face to face interview*) dengan sumber data (responden). Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan hasil data dari opini para partisipan.

3. Dokumentasi

Dalam mendapatkan data dalam penelitian ini, selain menggunakan metode observasi dan wawancara, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi, metode ini digunakan untuk melengkapi data yang

didapat dari hasil observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan adalah berupa catatan dan alat perekam serta dokumentasi berupa foto atau gambar.

3.5 Teknik Penentuan Narasumber

Teknik yang digunakan dalam memilih informan yaitu teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik yang digunakan dalam proses penentuan informan dengan pertimbangan kesesuaian dengan konteks permasalahan dalam suatu penelitian (sugiyono, 2015).

Adapun narasumber yang dipilih menjadi informan untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini yaitu:

Table 3.1
Tabel Narasumber penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Sub Bagian Umum	1 Orang
2.	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1 Orang
1	Kabid Seksi Kedaruratan dan Logistik	1 Orang
2	Pembantu Kasi Rehabilitasi dan Rekrontuksi	1 Orang
3	Pembantu Kasi Kedaruratan	1 Orang
4	Kepala Desa Gampong Pasir	1 Orang
5	Masyarakat Korban Bencana Banjir	3 Orang
	JUMLAH	9 Orang

3.6 Instrumen Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 136) instrument penelitian adalah fasilitas atau alat yang digunakan oleh peneliti dalam proses mengumpulkan data

agar lebih mudah dalam pekerjaannya sehingga menghasilkan data yang lebih baik, dalam arti lain menjadi lebih cermat lengkap dan juga sistematis sehingga data lebih mudah untuk diolah. Serta dalam penelitian kualitatif bersifat fleksibel dapat berubah dan berkembang tergantung dari proses penelitian sehingga hasilnya tidak dapat dipastikan. Maka daripada itu peneliti merupakan instrument terpenting dalam mengontrol hasil data yang tidak pasti kedalam hasil yang ingin diraih.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam melakukan penelitian kualitatif, dilakukan ketika pengumpulan data dilakukan dan setelah selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu. Pada saat melakukan wawancara, peneliti sudah terlebih dahulu melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai, bila jawaban yang didapat terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai pada tahap memperoleh data dan dapat dianggap kredibel (Sugiyono 2010:91)

Menurut Miles dan Huberman dalam Uber Sialahi (2009:339) ada tiga alur dalam kegiatan analisis yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dapat diartikan sebagai tahap pemilihan, pemusatan perhatian pada pengabstraksian, penyederhanaan, dan juga tranformasi data kasar yang timbul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah tahap pengumpulan informasi yang tersusun dengan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan, kemudian data yang telah dikategorikan tersebut kemudian dikelompokkan sebagai bahan penyajian data. Data tersebut disajikan secara deskriptif berdasarkan aspek yang diteliti.

3. Menarik Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang diambil masih bersifat sementara, dan bisa berubah apabila tidak terdapat bukti kuat yang dapat mendukung pada tahapan pengumpulan data selanjutnya. Namun apabila kesimpulan yang didapat pada tahap awal dapat didukung dengan bukti-bukti yang valid serta konsisten pada saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang di ambil merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat pada BPBD Aceh Barat dan Gampong Pasir Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Jadwal serta rangkaian kegiatan penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2021. Adapun jadwal penelitian yang dilakukan peneliti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2021					
		1	2	3	4	5	6
I	Persiapan penelitian						
	Observasi Awal						
	Pembuatan Proposal						
	Konsultasi						
	Seminar Proposal						
	Perbaikan						
II	Penelitian Lapangan						
	Pengolahan Data						
	Analisis Data						
III	Penulisan Hasil						
	Konsultasi						
	Seminar Hasil						
	Perbaikan						
IV	Sidang						

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan pada BPBD Kabupaten Aceh Barat yang beralamat di jalan Beringin Maju Gampong Seuneubok Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan Gampong Pasir Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Bangunan yang digunakan BPBD Aceh Barat dalam melaksanakan kegiatan kerja ialah Bangunan Escape Building Mitigasi Bencana yang di bangun oleh NGO pasca bencana Gempa Tsunami Aceh 2004.

4.2 Gambaran Umum BPBD Aceh Barat

BPBD Kabupaten Aceh Barat dibentuk dengan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana merupakan sebuah organisasi perangkat daerah yang diharapkan dapat menangani masalah kebencanaan di daerah, dalam menjalankan tugas beserta fungsinya BPBD Aceh Barat mempunyai 3 fungsi utama yaitu fungsi koordinasi, komando dan pelaksana, dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan wajib dibantu oleh stakeholder yang ada pada BPBD Aceh Barat. Untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat dijabat langsung oleh Sekretaris Daerah, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Aceh Barat.

4.2.1 Visi dan Misi BPBD Kabupaten Aceh Barat

A. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan untuk mengubah kondisi yang kurang menjadi lebih

baik. Visi dari BPBD Aceh Barat saat ini berpatokan sesuai Qanun Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2010 yaitu “ **Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan yang Transparan, kredibel, Akuntabel dan Terintegritas**”

Selain menyusun visi telah ditetapkan juga misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh kantor agar tercapainya visi di kantor tersebut. Kemudian dijabarkan dalam bentuk misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan.

B. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilakukan demi terwujudnya visi, yaitu sasaran yang akan dicapai, menetapkan tujuan organisasi serta menggambarkan tuags pokok dan fungsi BPBD. Adapun misi dari pada BPBD Aceh Barat ialah:

1. Islami: pemerintah dan masyarakat Aceh Barat dalam melaksanakan pembangunan sosial kemasyarakatan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai islami dan nilai luhur pancasilan dengan mengedepankan amar ma'ruf dan nahi mungkar untuk mewujudkan keadilan sosial (Baladun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur)
2. Pembangunan: pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat, untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana, dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat.

3. Ekonomi Kerakyatan: Membangun ekonomi kerakyatan dilaksanakan dengan menganut sistem perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat. Dengan kata lain ekonomi kerakyatan adalah kegiatan ekonomi yang dapat memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat dalam berpartisipasi aktif meningkatkan perekonomian dalam berbagai usaha-usaha produktif.

4.2.2 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Aceh Barat

Struktur organisasi BPBD Kabupaten Aceh Barat mempunyai susunan gambaran mengenai pembagian dan pembatasan antara tugas, tanggung jawab serta wewenang setiap orang dalam organisasi yang bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan tugas masing-masing pegawai staff. Adapun struktur organisasi BPBD Kabupaten Aceh Barat terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Unsur Pengarah
 - a. Ketua Unsur Pengarah; dan
 - b. Anggota Unsur Pengarah
3. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana
 - b. Sekretariat, terdiri dari
 - Sub Bagian Umum
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Program dan Pelaporan
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari
 - Seksi Pencegahan
 - Seksi kesiapsiagaan
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik
 - Seksi Kedaruratan
 - Seksi Logistik

- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekrontuksi
 - Seksi Rehabilitasi
 - Seksi Rekrontuksi
4. Kelompok Jabatan Fungsional

4.2.3 Tugas dan Fungsi Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Barat

Berdasarkan qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2010 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat. Beberapa tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Aceh Barat adalah sebagai berikut:

1. Tugas
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Pemerintah Aceh dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekrontuksi secara adil dan merata
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
 - c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
 - e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya

- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati Aceh Barat setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh dan sumber penerimaan lainnya
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh
- c. Pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi dalam tahapan prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana
- d. Pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi dan/atau institusi terkait lainnya pada tahap pra bencana dan pasca bencana
- e. Pengkoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPD, instansi vertikal terkait lainnya dalam rangka penanganan darurat bencana.

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Efektivitas Kinerja BPBD Kabupaten Aceh Barat

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan sebuah organisasi atau instansi pemerintah yang diharapkan dapat menangani permasalahan kebencanaan di daerah terutama di sekitar masyarakat sehingga perlu nya melihat efektivitas kinerja dari BPBD untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas dari kinerja BPBD Kabupaten Aceh Barat.

Untuk mengukur efektivitas kinerja dari BPBD Aceh Barat peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa pejabat yang ada di kantor BPBD Aceh Barat yang terlibat langsung dalam tahap pra bencana, bencana, dan tahap rekonstruksi dan rehabilitasi pada proses penanggulangan banjir rob yang ada di gampong Pasir Kecamatan Johan Pahlawan.

4.3.2 Sumber Daya Pegawai BPBD Kabupaten Aceh Barat

BPBD Kabupaten Aceh Barat memiliki jumlah pegawai sebanyak 150 orang yang terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 36 orang
 2. Pegawai Tenaga Harian Lepas (THL)/Kontrak sebanyak 146 orang
- berdasarkan SK Bupati Aceh Barat tahun 2021

4.3.3 Indikator Efektivitas Kinerja BPBD Kabupaten Aceh Barat

4.3.3.1 Efisiensi Dalam Pelayanan

Hasil wawancara dengan Ibu Imilda (Kasubbag Umum) dengan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan indikator pengukur efektivitas mengatakan bahwa:

“Kami selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sesuai dengan prosedur yang telah kami atur berdasarkan SOP yang merujuk kepada peraturan Bupati No 13 Tahun 2010 tentang bagaimana kami diatur dalam menjalankan dan melaksanakan tugas. Kami rasa telah melakukan tugas sebaik mungkin namun itu kembali kepada masyarakat, kadang kala banyak masyarakat masih menganggap bahwa pelayanan kami kurang efisien dan tidak tepat waktu, itu tentu menjadi kritikan dan saran bagi kami untuk bisa lebih maksimal dalam bekerja”(Wawancara tanggal 11 Juni 2021)

Kemudian Hasil wawancara dengan Bapak Masuri (pembantu kasi kedaruratan) BPBD Aceh Barat mengatakan bahwa :

“Kami tentunya berpegang teguh pada filosofi dari simbol dan lambang dari pada BPBD sendiri, yaitu lambang segitiga yang dimulai dari pemerintah, dunia usaha dan juga masyarakat. Jadi kesimpulannya pemerintah yang bangun, baru kemudian usaha yang nantinya akan memberikan hasil dan dampak bagi masyarakat, dan terus berputar berdasarkan siklus tersebut. dalam hal ini kami mengarah kepada cara kerja yang sudah diatur dalam RENSTRA BPBD Aceh Barat. Dalam proses penanggulangan banjir rob ini, kami selaku BPBD Aceh Barat tentu sudah membuat program sesuai dengan visi misi BPBD Aceh Barat, kami membuat program desa tangguh bencana, untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat akan bahaya bencana” (Wawancara tanggal 10 Juni 2021)

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Erizal Efendi (Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan) menyatakan bahwa:

“Untuk efisiensi pelayanan, kami dari Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan telah lebih dahulu membuat peta bencana maupun peta rawan bencana, guna untuk menentukan arah evakuasi nantinya pada saat terjadinya bencana, kami juga membuat beberapa program seperti Sosialisasi Mitigasi Bencana kepada masyarakat diberbagai kalangan, mulai dari anak TK hingga orang tua, dan itu biasanya kami lakukan sebulan sekali” (wawancara 10 Juni 2021)

Hal yang sama juga di katakan oleh Ibu Dewi Tiorita (Kabid Kedaruratan dan logistik) menyatakan:

“Kami mempunyai tujuan yang jelas dalam pelaksanaan, dalam hal ini kami berpatokan kepada SOP yang telah ditetapkan, sehingga kami semakin terarah dalam melaksanakan kegiatan, SOP yang kita berikan tentu berbeda pada tiap bencana, biasanya pelaksanaan berdasarkan bencana apa yang terjadi, seperti halnya bencana Banjir rob ini, kami akan melaksanakan target berdasarkan jenis bencana yang terjadi, jadi tidak ada

kesamaan proses penanggulangan pada tiap bencana. (Wawancara tanggal 10 Juni 2021)

Peneliti juga mewawancarai masyarakat korban bencana banjir dengan indikator yang telah ditentukan sebelumnya, berdasarkan alat ukur efektivitas kinerja BPBD Aceh Barat. Bapak Hasan (masyarakat gampong pasir) menyatakan bahwa :

“Untuk efisien saya tidak memperhatikan secara keseluruhan pekerjaan yang dilakukan BPBD Aceh Barat saat penanggulangan bencana kemarin, akan tetapi dari yang bisa saya nilai mereka kadang lambat turun dalam membantu masyarakat”

Hal serupa juga disampaikan oleh saudara Agam (masyarakat gampong pasir) yaitu :

“Kami hanya membutuhkan bantuan pada saat terjadinya bencana, kemarin pada saat banjir datang rumah kami sudah diterjang oleh ombak besar, namun BPBD justru datang ketika pasang sudah mulai surut, jadi maksud kami kesiapsiagaan mereka dimana? Kami butuh mereka pada saat penanggulangan terjadi, dari situ saya rasa mereka masih kurang siaga”

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber peneliti dapat simpulkan bahwa, BPBD Aceh Barat telah efisien dalam pencegahan bencana, namun dalam proses lapangan pada saat terjadinya bencana, BPBD masih kurang siaga ketika memberikan penanggulangan.

4.3.3.2 Daya Tanggap Petugas

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada kantor BPBD Aceh Barat dan juga pada Gampong Pasir peneliti mendapatkan hasil terkait bagaimana ketanggapan dari petugas dalam penanggulangan bencana di Gampong Pasir sebagaimana yang telah disampaikan oleh bapak Masuri (pembantu kasi kedaruratan)

“Kalau ketanggapan petugas, untuk BPBD sendiri sudah mempunyai Tim Reaksi Cepat (TRC) yang telah diatur dalam peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 tahun 2008, dimana pada saat terjadinya bencana tim ini sudah siap dan sigap bencana” (Wawancara tanggal 10 Juni 2021)

Serupa dengan hal tersebut Ibu Dewi Tiorita (Kabid Kedaruratan dan Logistik) menyatakan bahwa:

“Biasanya kami melakukan pengkoordinasian peralatan maupun logistik kelokasi bencana, disini kita bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk bantuan logistik seperti Sembako, kami juga mendirikan pos makanan disetiap desa yang terkena bencana banjir, dalam hal ini kami juga melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku” (wawancara 10 Juni 2021)

Akan tetapi hal berbeda justru peneliti dapatkan ketika mewawancari salah satu narasumber yaitu Bapak Joni Aruji (Keuchik Gampong Pasir) yang menyatakan :

“Menurut kami strategi yang digunakan oleh BPBD sendiri masih belum mencapai tujuan yang kami inginkan, banyak keperluan yang kami minta kepada BPBD duntuk mengurangi permasalahan justru harus terkendala dengan lamanya respon dari pihak pusat. Seperti sebelum banjir rob terjadi, sudah lebih dulu kami dilanda pasang namun dalam skala yang kecil, maka dari itu kami meminta kepada pihak BPBD Aceh Barat untuk menyediakan karung goni untuk dijadikan tanggul sementara. Akan tetapi sebulan setelah kami meminta goni tersebut, belum juga sampai pada hingga akhirnya banjir rob melanda daerah kami, dikarenakan tidak adanya tanggul penahan yang mampu menghentikan terjangan ombak besar, namun keterangan yang saya terima dari pihak BPBD dikatakan belum sampai karena lamanya respon dari pihak bupati”(wawancara tanggal 14 juni 2021)

Serupa dengan penyampaian dari saudara Agam (Masyarakat Gampong Pasir)

“program yang diberikan oleh BPBD sejauh ini memang bagus, akan tetapi dalam pengendalian banjir rob terjadi justru mengalami banyak sekali kendala yang seringkali membuat kami kecewa, banyak dari kami mengeluh terkait kesigapan dari BPBD. Lamanya waktu yang digunakan dalam proses penanggulangan banjir juga membuat kami merasa kesal, terkadang mereka tidak tepat waktu ketika bencana banjir datang, kami merasa agak kecewa dengan kesigapan dari petugas BPBD, ketika terjadi

bencana mereka sering datang terlambat dan tidak tepat waktu. Pada saat evakuasi mereka hanya berdiri-diri saja, tidak mengevakuasi kami, kasian melihat orang tua yang sudah tidak sanggup berjalan, justru yang paling banyak melakukan evakuasi dari pihak TNI-AD” (wawancara tanggal 14 Juni 2021)

Selanjutnya informan yang lain yaitu Ghani (masyarakat gampong pasir)

menyampaikan bahwa :

“Dari yang saya lihat, mereka belum sepenuhnya paham akan kondisi masyarakat terkadang pihak BPBD sering acuh tak acuh ketika menangani masalah kami, hal ini terbukti ketika proses penanggulangan banjir yang terjadi pada sabtu siang tahun 2019 yang lalu, mereka tidak tepat waktu dalam menangani banjir didesa ini, mereka memang datang ketika melakukan sosialisasi kepada masyarakat namun pada penerapannya justru sangat tidak efisien mereka kurang sigap dalam menangani masalah banjir rob ini” (wawancara tanggal 14 Juni 2021)

Begitu juga yang disampaikan oleh salah satu narasumber yaitu Bapak Hasan (masyarakat gampong pasir) yang menyatakan bahwa:

“Sejauh ini BPBD sering melakukan sosialisasi ke desa kami memberikan edukasi terkait pencegahan bencana, arah evakuasi dan juga peta rawan bencana, mereka sering datang untuk melihat bibir pantai yang sering terkikis karena terjangan ombak yang besar, terkait dengan pendirian posko hanya didirikan ketika bencana banjir datang saja” (14 Juni 2021)

Dalam hal ini peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwasanya, daya tanggap petugas sudah maksimal dalam tahap pencegahan dan kesiapsiagaan namun masih belum maksimal pada tahap kedaruratan dan juga rehabilitasi dan rekrontuksi terlihat dari proses evakuasi bencana masih banyak keluhan yang didapat oleh masyarakat terkait proses penanganan yang mereka berikan

4.3.3.3 Sarana dan Prasarana

Terdapat perbedaan penyampaian yang diberikan dari pihak BPBD dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat dalam hal ini peneliti sudah terlebih dahulu mewawancarai Bapak Masuri (pembantu kasi kedaruratan)

“Untuk sarana dan prasarana di BPBD sendiri sudah lengkap, hanya saja untuk kasus banjir rob, kami hanya mempunyai kendaraan alat berat berupa Bulldozer dan juga alat berat jenis back Hoe (Beko) yang masih berfungsi di kantor BPBD, selebihnya sudah di jadikan sebagai aset karena sudah tidak layak pakai, tugas kami pada saat itu hanya membersihkan ruas jalan, membersihkan parit” (wawancara 14 Juni 2021)

Hal serupa juga di sampaikan oleh Bapak Abdul (Pembantu Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi)

“Untuk fasilitas sarana dan prasarana disini semua sudah lengkap, paling banyak untuk jenis bencana kebakaran. Ada beberapa jenis alat berat yang dibutuhkan sudah tidak layak pakai. Kemudian dijadikan sebagai aset kantor” (wawancara tanggal 11 Juni 2021)

Selanjutnya penyampaian dari Bapak Joni Arjun (Keuchik Gampong Pasir)

“Kami sangat kecewa dengan fasilitas yang BPBD punya, bahkan untuk membersihkan rumah warga kami memakai dari dana desa, karena pada saat kami mengadu kepada BPBD mereka bilang tidak ada fasilitas, mereka Cuma punya alat berat sejenis sekop pasir itupun digunakan hanya untuk membersihkan jalan, akan tetapi untuk rumah warga tidak diberikan penanganan. Kami terpaksa memotong anggaran dari dana desa pada bidang pembangunan, kami melakukan gotong royong secara bersama-sama” (wawancara 14 Juni 2021)

Serupa dengan penyampaian salah satu informan yaitu saudara Agam (Masyarakat) mengatakan bahwa:

“Untuk fasilitas sarana dan prasarana sangat tidak mendukung, pihak BPBD tidak mempunyai banyak jenis alat berat yang bisa digunakan untuk proses evakuasi berlangsung, mereka hanya membuka akses jalan menggunakan mobil serok, untuk membersihkan rumah kami memakai dana sendiri yaitu dana desa, dana tersebut dikeluarkan juga karena kami

sudah kesal dengan penanganan yang lalai dari BPBD, kami bahkan menyewa alat berat (beko)” (wawancara tanggal 14 Juni 2021)

Dari hasil wawancara beserta data aset BPBD dalam penanggulangan bencana banjir yang peneliti dapatkan, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasana yang ada di BPBD masih sangat kurang dan tidak begitu lengkap, hal tersebut dapat dilihat dari alat berat yang kurang memadai sehingga menjadi kendala dalam proses evakuasi, data aset BPBD dalam penanggulangan banjir dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Daftar Aset BPBD Kabupaten Aceh Barat Untuk Penanggulangan Banjir

NO	NAMA ASET PENANGGULANGAN BANJIR	JUMLAH
1	Truck	1
2	Sepeda Motor	1
3	Generator	3
4	Radio Komunikasi	2
5	Reapiter	2
6	Rig	5
7	Papan Selancar	1
8	Rubber Boat Besar	1
9	Rubber Boat Kecil	1
10	Mesin Perahu Karet 15 PK	1
11	Mesin Perahu Karet 18 PK	1
12	Mesin Perahu Karet 25 PK	1
13	Mesin Perahu Karet 40 PK	2
14	Tenda Posko	1
15	Tenda Pleton	2
16	Tenda Regu	4
17	Tenda Keluarga	5
18	Velbet	15
19	lampu Senter Hid Sealchligh	1
20	Water Treatmen Portable	1
21	Sepeda Motor Trail	2
22	Mobil Rescue	1
23	Tenda Peton 15x4 M	10
24	Handy Talk	20

25	Life Jacket	11
26	Pengeras Suara	1
27	Radio SBB	1
28	Power Supply	1
29	Antena Bentang	1
30	Tas Ransel TRC	10
31	Rompi Pelampung	10
32	Peralatan DPU	3
33	Ring boy Gabus	2
34	Elektrik Pomp	2
35	Tenda	3

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat (2021)

4.3.3.4 Semangat Kerja Sama dan Loyalitas Kelompok Kerja

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapatkan bahwa semangat yang dibangun oleh BPBD Aceh Barat sangat baik, hal ini dibuktikan dengan adanya kerja sama antara Dinas Sosial maupun pihak lain seperti pihak-pihak universitas yang ada di Aceh Barat. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Masuri (Pembantu Kasi Kedaruratan)

“Dilihat dari petugas BPBD sendiri kami rasa sudah sangat baik, mereka mau bekerja sama, tentu pada proses penanggulangan itu dibutuhkan kerjasama yang tinggi antar petugas, guna mencapai keberhasilan tujuan, kami sangat suka membangun keakraban dengan semua petugas yang bergabung dalam memberikan bantuan baik itu sebelum, sedang dan setelah terjadinya bencana. Namun untuk bagian kepegawaian kantor BPBD Sendiri saya rasa masih kurang, mereka masih kurang mengerti akan pekerjaan mereka, namun sayangnya mereka tidak berinisiatif untuk belajar” (wawancara tanggal 21 juni 2021)

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Imilda (Kasubbag Umum):

“Petugas di BPBD mempunyai semangat kerja yang tinggi, mereka tidak banyak mengeluh terhadap tugas yang diberikan, mereka akan melaksanakan tugas dengan baik, kami membangun semangat antar pegawai dengan menjalin keakraban layaknya keluarga, namun terkadang masih banyak pegawai disini masih berharap kepada staff yang lain dalam bekerja” (wawancara tanggal 11 juni 2021)

Selanjutnya penyampaian dari Ibuk Dewi Tiorita (Kasi Kedaruratan dan Logistik) menyatakan :

“Kalau masalah semangat para pegawai disini saya rasa perlu ditingkatkan lagi, karena masih banyak pegawai yang lalai dalam tugas mereka, namun untuk petugas lapangan seperti para THL yang terjun langsung ketika terjadinya bencana mereka lebih siap dibandingkan yang lain” (wawancara tanggal 10 juni 2021)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa semangat kerja dari pegawai BPBD Aceh Barat masih kurang, sehingga berdampak terhadap pekerjaan yang dilakukan.

4.3.3.5 Hubungan Antara Pimpinan dan Bawahan

Untuk merekatkan hubungan antara pimpinan bawahan tentu membutuhkan komunikasi yang baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Memiliki persepsi yang sama, sehingga pada saat menyampaikan suatu pesan ataupun informasi dapat berjalan dengan baik dan terarah. Kunci keberhasilan suatu organisasi dilihat dari terjalinnya keakraban antara pimpinan serta bawahan sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Imilda (Kasubbag Umum) yaitu:

“Dalam sebuah organisasi tentu dibutuhkan hubungan yang baik antara pimpinan terhadap bawahan maupun sebaliknya, namun untuk menjalin keakraban antara pegawai maupun petugas saya rasa kami semua saling komunikasi satu sama lain” (wawancara 11 Juni 2021)

Selanjutnya penyampaian oleh Bapak Masuri (Pembantu Kasi Kedaruratan) yaitu :

“Hubungan pimpinan dan bawahan pada kantor ini masih sangat kurang, seperti yang sudah dijelaskan di awal, masih banyak pegawai yang tidak paham akan oposi kerja masing-masing, untuk itu pegawai disini saya kira butuh pembinaan lebih oleh pimpinan, sudah jelas bahwa pegawai kantor BPBD banyak yang belum mengerti tujuan masing-masing.” (wawancara tanggal 21 Juni 2021)

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Dewi Tiorita (Kasi Logistik) yang mengatakan bahwa:

“untuk hal itu kami disini saya rasa sudah lumayan baik, kami berkomunikasi satu sama lain, namun untuk kekurangan nya banyak pegawai yang baru dimutasi kadang belum paham pekerjaan mereka seperti apa sehingga menyulitkan para atasan memberikan arahan”

Berdasarkan penyampaian informan, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa BPBD Kabupaten Aceh Barat belum mampu menciptakan hubungan yang baik antara atasan maupun bawahan guna mencapai kinerja yang baik, namun pada proses nya mereka masih dalam tahap belajar untuk bisa mengerti popsi pekerjaan masing-masing.

4.4 Hambatan dan Upaya dalam Mencegah Banjir Rob

Dalam menjalankan tugasnya, BPBD Aceh Barat tentu menemui berbagai hambatan yang dapat mengganggu mereka ketika melakukan penanggulangan bencana, seperti yang dikatakan oleh bapak Mashuri (pembantu kasi kedaruratan) sebagai berikut:

“hambatannya masyarakat pada saat banjir rob tidak mau dievakuasi, jadi menyulitkan petugas untuk membantu evakuasi, dan warga pun masih takut meninggalkan rumah, karena mereka takut kehilangan harta benda saat ditinggalkan, untuk upaya yang bisa kami kerahkan ketika proses penanggulangan yaitu membuka jalan, membuat karung pasir, membersihkan parit” (wawancara tanggal 23 juni 2021)

Hasil wawancara pegawai yang bertanggung jawab langsung pada saat penanggulangan yaitu Bapak Abdul (Kasi Pembantu Rehabilitasi dan Rekrontuksi) menyatakan bahwa :

“kendala yang kami rasakan itu berupa dana, karena proses pencairan dana juga terkadang membutuhkan waktu yang dibilang lumayan lama. Dari itu juga menjadi sedikit kendala kami dalam bertindak” (wawancara tanggal 11 juni 2021)

Selanjutnya dalam berbagai kendala yang dihadapi BPBD Aceh Barat sudah sepatut dan selayaknya untuk melakukan strategi dan upaya yang dibuat secara terus-menerus untuk meningkatkan kinerja mereka, seperti yang disampaikan oleh ibu Imilda (Kasubbag Umum) menyatakan sebagai berikut”

“kalau untuk upaya BPBD paling bisa membersihkan parit dengan alat berat, membuat jalan di tempat masyarakat dan membuat kantung pasir yang kita sediakan sampai dengan 100 buah karung pasir untuk menanggulangi banjir rob tersebut, kami tetap terus berupaya dalam meningkatkan kinerja yang baik bagi masyarakat, dengan terus melakukan upaya-upaya dalam menanggulangi bencana tersebut”

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Mashuri (kasi pembantu kedaruratan) yaitu:

“upaya yang kami lakukan saat ini hanya terus mengevaluasi hasil kerja dengan terus memantau kembali desa yang terkena bencana, sebelumnya kami telah membuat program dengan menempatkan relawan pada setiap desa sesuai dengan program desa tangguh bencana, namun hambatan lain pada saat ini berupa masyarakat yang tidak mau di relokasi karena tidak ingin meninggalkan tanah leluhur mereka, Alhamdulillah dari pemerintah provinsi sudah mulai membangun kembali tanggul sepanjang 600 Meter disepanjang bibir pantai, sehingga kami harapkan itu bisa menjadi kabar baik bagi masyarakat untuk bisa menanggulangi bencana banjir rob ini”

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa hambatan yang dirasakan oleh pihak BPBD Aceh Barat pada saat penanggulangan bencana banjir rob tersebut disebabkan karena susah nya untuk mengevakuasi masyarakat pada saat proses penanggulangan bencana, kemudian lambatnya dana yang diberikan juga menjadi hambatan sendiri karena membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Namun BPBD tetap memberikan upaya untuk bisa mengurangi hambatan yang terjadi, dengan cara terus melakukan perbaikan-perbaikan untuk bisa mengurangi dampak bencana kedepannya.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 25 perlu dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta didukung oleh Qanun Bupati Aceh Barat Nomo 13 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja BPBD yaitu Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah membentuk BPBD Kabupaten Aceh Barat.

BPBD adalah suatu kerja perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka Penanggulangan Bencana di Kabupaten Aceh Barat. BPBD dengan segala keterbatasan kapasitasnya mulai terbentuk sejak 30 Januari 2011, telah berupaya secara maksimal untuk melakukan tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan pelayanan penanggulangan bencana. Namun demikian, atas dasar masukan dan saran, pelayan penanggulangan masih harus ditingkatkan lagi serta masih banyak hal yang harus menjadi perhatian untuk menuju perbaikan serta penyempurnaan nya, maka dari itu salah satu cara dalam melihat kinerja BPBD Aceh Barat ditinjau dari efektivitas kinerja yang telah dilaksanakan.

5.1.1 Efisiensi Pelayanan

Efisiensi didefenisikan sebagai ketepatan cara dalam melakukan sesuatu, dan kemampuan dalam melaksanakan tugas dengan baik tanpa membuang waktu, biaya serta tenaga untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang telah

dikehendaki. Dimana efisiensi dari kebijakan layanan sebuah organisasi melihat sejauh mana sumber daya manusia mampu melaksanakan tugas dengan baik tanpa membuang waktu namun tetap berhasil mencapai target yang diinginkan.

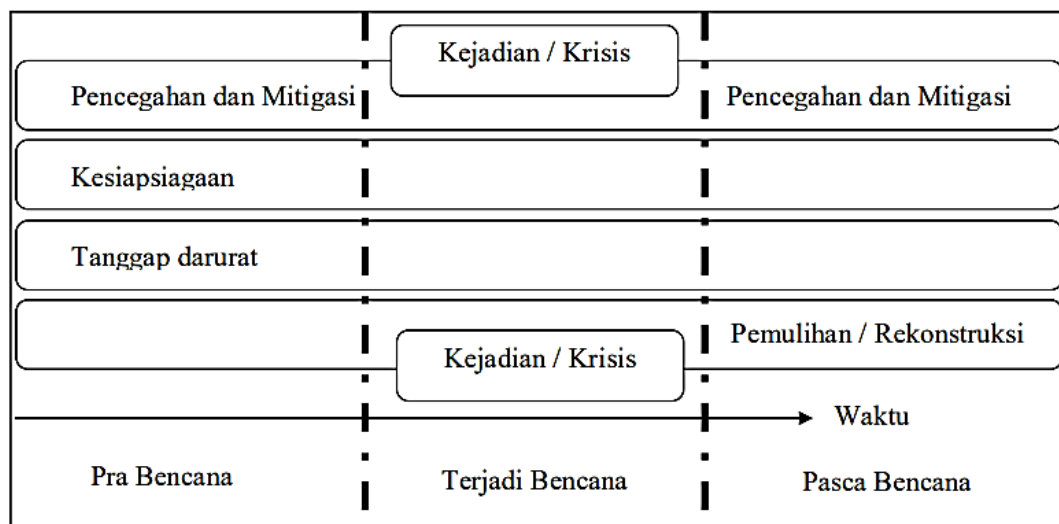
BPBD Aceh Barat dalam penanggulangan bencana banjir rob yang terjadi di gampong pasir, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dikatakan masih belum optimal dalam efisiensi pelayanan, berdasarkan indikator efisiensi pelayanan yaitu tepat waktu dalam memberikan pelayanan, tepat sasaran, serta mampu melaksanakan tugas dengan baik merupakan hal yang harus dipenuhi untuk mencapai kriteria dari pada efisiensi pelayanan. Dilihat dari lamanya waktu yang BPBD kerahkan pada saat melakukan pelayanan terhadap masyarakat ketika terjadinya banjir menjadi kekurangan akibat kelalaian dari pada BPBD.

5.1.2 Daya Tanggap Petugas

Daya tanggap merupakan kemampuan seseorang dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan sangat menentukan hasil kerjanya, daya tanggap petugas pun dituntut untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Disaat penanggulangan bencana, masyarakat membutuhkan pelayanan penanggulangan tanpa harus menunggu lama dan sesegera mungkin. Dalam hal ini BPBD Aceh Barat masih kurang tanggap ataupun responsif terhadap bencana yang terjadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa daya tanggap petugas pada saat bencana terjadi masih sangat rendah dan lebih diperlukan pembinaan lebih lanjut.

Berdasarkan SOP yang telah disusun sebelumnya, BPBD mempunyai Tim Reaksi Cepat (TRC) sebagai garda terdepan ketika terjadinya bencana, hal tersebut menjadi patokan bahwasanya BPBD dituntut untuk bisa lebih tanggap terhadap bencana akan tetapi pada saat melaksanakan kegiatan BPBD masih

dianggap kurang sigap dan tanggap terhadap bencana banjir yang terjadi. Dalam Panduan Perencanaan Kontijensi Menghadapi Bencana sudah dijelaskan bahwa tahapan pra-bencana, maupun kegiatan-kegiatan dibidang pencegahan dan mitigasi menempati porsi/peran terbesar, begitu juga pada saat bencana terjadi dan pasca bencana. Hal tersebut mempunyai korelasi antara proses satu dengan yang lainnya dalam penanggulangan bencana, sehingga menjadi hal yang penting terkait penanggulangan kebencanaan, dapat dilihat pada gambar 5.1 berikut ini:



Gambar 5.1

Korelasi Penanggulangan Pra-Bencana, Saat Terjadi Bencana dan Pasca-Bencana Alam

(Sumber : Panduan Perencanaan Kontijensi Menghadapi Bencana (edisi kedua), Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2021)

Penjelasan mengenai gambar 5.1 tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pada Tahapan Pra-Bencana.

Kegiatan-kegiatan dibidang pencegahan dan mitigasi menempati porsi terbesar. Hal tersebut dilihat dari program yang BPBD Aceh Barat telah lakukan berupa sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat, membuat peta rawan bencana dan peta arah evakuasi, hal tersebut dianggap sudah

efektif dikarenakan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait edukasi kebencanaan.

b. Pada Saat Terjadi Bencana

Kegiatan-kegiatan di bidang tanggap darurat menempati peran/porsi lebih besar, karena pada tahapan ini BPBD lebih dibutuhkan untuk menanggulangi serta membantu para korban yang terdampak bencana. Dalam tahapan ini BPBD dianggap lalai dalam melaksanakan tugas, berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti dapatkan mereka masih banyak berdiri ketika bencana terjadi hal ini dapat dilihat bahwa BPBD Aceh Barat masih kurang responsif terhadap bencana yang terjadi. Dari pihak BPBD sudah mengerahkan Tim Reaksi Cepat (TRC), namun demikian masyarakat masih terus mengeluh terkait kesiapsiagaan BPBD Aceh Barat.

c. Pada Tahapan Pasca-Bencana

Kegiatan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi juga menempati porsi/peran lebih besar. Korelasi antara tahap satu ke tahap lainnya menggambarkan pentingnya peran masing-masing kabid dalam tahapan penanggulangan. Untuk itu kesiapsiagaan petugas dibutuhkan guna menghindari dampak yang lebih besar. Pada tahapan ini, BPBD Aceh Barat telah berupaya melakukan perbaikan pasca terjadinya bencana, seperti membersihkan ruas jalan, membersihkan parit, dan memberikan 100 karung pasir kepada masyarakat. Namun hal tersebut masih dianggap kurang oleh masyarakat karena pada saat proses evakuasi dilakukan BPBD tidak ikut membantu warga dalam membersihkan rumah dari endapan pasir, kemudian dalam

membangun tanggul sementara masyarakat bergotong-royong dan mengeluarkan dana desa untuk menyewa alat berat. Dengan demikian kinerja dari BPBD dianggap masih sangat kurang dalam tahapan ini

5.1.3 Sarana dan Prasarana

Salah satu bagian terpenting dalam suatu sistem pelayanan terhadap masyarakat merupakan lengkapnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh organisasi tersebut, karena tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai pelayanan menjadi terhambat. Hal tersebut menjadi masalah yang kerap kali ditemukan diberbagai organisasi seperti BPBD Aceh Barat yang masih kekurangan dalam sarana dan prasarana.

Hal tersebut menjadikan kinerja BPBD mengalami hambatan pada saat penanggulangan bencana. Sarana yang paling banyak dimiliki oleh BPBD Aceh Barat berupa alat pada bencana kebakaran, namun untuk bencana banjir pasang air laut BPBD hanya mempunyai alat bencana dalam skala ringan saja. Dapat dilihat berdasarkan Tabel 4.1 Data Aset BPBD dalam Penanggulangan Bencana Banjir bahwa peralatan yang dibutuhkan pada saat banjir rob masih sangat kurang, seperti alat berat untuk membantu pada saat evakuasi bencana.

5.1.4 Semangat Kerja Sama dan Loyalitas Kerja

Semangat kerja merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi dan perlu mendapatkan perhatian lebih dari pimpinan organisasi, agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Semangat kerja adalah suatu refleksi dari pribadi ataupun kelompok terhadap kerja atau kerja sama. Apabila hasil kerja yang dilakukan sempurna, mampu melakukan tugas dengan optimis serta ramah

satu sama lain, maka karyawan tersebut dikatakan membuat semangat kerja yang tinggi.

Dalam menjalankan tugas kerja karyawan tidak akan lepas dari sikap kerja dan loyalitas, sehingga dengan demikian karyawan tersebut akan selalu menjalankan tugasnya dengan baik. Karyawan merasakan adanya kesenangan yang mendalam terhadap pekerjaan yang dilakukan. BPBD Aceh Barat semangat kerja serta loyalitas sangat diperlukan, sebagai organisasi yang membantu dan melayani hidup masyarakat dan orang banyak hal tersebut sangat diperlukan dan dijaga demi kualitas pelayanan.

Dari hasil wawancara dengan pegawai yang ada di BPBD Aceh Barat peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa, masih kurangnya semangat kerja dari pada pegawai, mereka masih belum tau posisi kerja masing-masing, hal tersebut dikarenakan banyak dari mereka sebelumnya berasal dari mutasi kantor yang berbeda-beda, sehingga perlu beradaptasi dengan keadaan lingkungan yang sekarang. Namun untuk petugas lapangan yang langsung terjun kelapangan ataupun petugas relawan, dikatakan baik dalam melaksanakan tugas. Dari pemaparan tersebut dapat dilihat bahwasanya kerja sama dalam menjalankan tugas diperlukan guna mendukung kecepatan dalam melakukan tugas, sehingga menjadikan pelayanan lebih maksimal.

Hasil analisis peneliti berdasarkan pengamatan yang telah didapatkan selama berada di kantor BPBD Aceh Barat menunjukkan bahwa semangat kerja sama yang dibangun oleh petugas BPBD masih kurang optimal, hal tersebut dapat dilihat ketika tidak terjadinya bencana, banyak petugas hanya tidur-tiduran dan tidak melakukan kegiatan. Berdasarkan hal tersebut BPBD belum mampu untuk

mengoptimalkan waktu kerja dengan sebaik-baiknya, seperti pada saat tidak terjadinya bencana BPBD bisa melakukan pelatihan-pelatihan yang mampu meningkatkan kinerja mereka, sehingga pada saat terjadinya bencana mereka sudah lebih siap dan tanggap ketika melakukan penanggulangan.

5.1.5 Hubungan Antara Pimpinan dan Bawahan

Komunikasi merupakan sebagai suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari suatu pihak ke pihak yang lain. Begitu juga dalam suatu organisasi untuk merekatkan hubungan antara pimpinan dan bawahan diperlukannya suatu komunikasi yang baik guna menjalin hubungan yang harmonis, sehingga mampu mencapai keberhasilan tujuan organisasi yang diinginkan.

Dari hasil penelitian melalui wawancara dengan pegawai kantor BPBD Aceh Barat peneliti mendapatkan hasil bahwa, hubungan antara pimpinan dan bawahan belum terlalu terjalin dengan baik, hal tersebut terjadi karena masih banyak pegawai yang baru dimutasi dari kantor sebelumnya sehingga masih memerlukan adaptasi dengan pegawai ataupun lingkungan yang baru. Hal ini menjadi perbaikan bagi BPBD Aceh Barat untuk bisa menjalin keakraban dengan sesama petugas maupun pegawai yang ada di kantor sebagai hubungan antara pimpinan dan bawahan guna mencapai tujuan organisasi yang diinginkan.

5.2 Hambatan dan Upaya BPBD Aceh Barat dalam Penanggulangan Bencana Banjir

Penanggulangan yang dilakukan BPBD Aceh Barat tidak selalu berjalan dengan mulus, selalu ada hambatan atau kendala pada proses pelaksanaan.

5.2.1 Hambatan

Adapun hambatan dari internal BPBD itu sendiri ialah kurangnya SDM yang kompeten dan sigap terhadap bencana, hal tersebut dianggap kurang optimal karena minimnya pelatihan-pelatihan terhadap petugas pada saat tidak terjadinya bencana sehingga menjadikan petugas dianggap masih kurang kompeten ketika melakukan penanggulangan bencana. kemudian kurangnya fasilitas penunjang berupa alat pada saat evakuasi bencana dilakukan, lambatnya pencairan dana juga menjadi kendala dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Hubungan antara pimpinan dan bawahan juga menjadi faktor kendala yang menjadi penghambat dalam melakukan kinerja. Adapun kendala eksternal berupa banyaknya masyarakat yang tidak mau dievakuasi pada karena takut kehilangan harta benda pada saat meninggalkan rumah.

5.2.2 Upaya

Dari banyaknya hambatan yang terjadi, BPBD Aceh Barat juga selalu memberikan upaya untuk meminimalisir dampak yang lebih besar kedepannya. BPBD juga bekerjasama dengan pemerintah pusat untuk merelokasi warga yang terkena dampak dari bencana banjir rob tersebut, membuat desa tangguh bencana sebagai mitigasi pencegahan bencana dan juga menempatkan relawan bencana pada setiap daerah rawan bencana. Adapun hasil analisis yang peneliti dapat berikan ialah BPBD Aceh Barat dapat melakukan pelatihan-pelatihan setiap harinya ketika tidak terjadinya bencana, hal ini dapat menjadikan petugas untuk bisa lebih produktif dibanding tidak melakukan aktifitas apa-apa. Seperti latihan fisik untuk menjaga stamina para petugas, kemudian pelatihan kebencanaan sehingga pada saat terjadinya bencana para petugas mampu melakukan

penanggulangan dengan tanggap dan sigap sehingga dapat menjadikan pekerjaan lebih efektif dan efisien.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis serta pemaparan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Efektivitas Kinerja BPBD Aceh barat masih belum optimal dalam penanggulangan bencana, berdasarkan efisiensi pelayanan BPBD belum mempunyai sikap siaga terhadap bencana, serta ketepatan waktu dalam melaksanakan tugas, dan kurang responsif pada saat tanggap darurat
2. kurangnya sarana serta sarana penunjang juga menjadi hambatan bagi BPBD sehingga tidak optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah diukur sebelumnya. Sehingga hal tersebut menjadikan BPBD belum dikatakan efektif dalam menjalankan kinerja yang telah ditugaskan.

6.2 Saran-saran

1. Perlu adanya persiapan para pegawai BPBD Aceh Barat dengan cara mengikuti kegiatan kursus atau pelatihan teknis untuk meningkatkan pengembangan kapasitas manajemen bencana yang baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Kepada pemerintah untuk terus meningkatkan upaya dalam pemberian dana maupun sarana dan prasana agar BPBD Aceh Barat dapat melakukan penanggulangan dengan baik kepada masyarakat.
3. Diharapkan kepada masyarakat untuk bisa lebih mempercayai BPBD Aceh Barat dalam proses evakuasi, untuk lebih memudahkan BPBD Aceh Barat dalam melakukan penanggulangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S., & Roikan. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta Timur: PRENADAMEDIA GROUP.
- Anggito, A., & Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Ariyanto, D. (2018). Koordinasi Kelembagaan Dalam Meningkatkan Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah. *Journal of Management Review*, 2(1), 161. <https://doi.org/10.25157/jmr.v2i1.1118>
- Awalia, V. R., Mappamiring, M., & Aksa, A. N. (2015). Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Resiko Bencana Banjir Di Kabupaten Kolaka Utara. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 202–213. <https://doi.org/10.26618/ojip.v5i2.124>
- Dieng, G. A., & Ciremai, G. (2010). *Letusan Gunung Api. m*.
- Findayani, A. (2015). Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Semarang. *Jurnal Geografi*.
- Heryati, S. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 2(2), 106–125.
- Ikhsyan, N., Muryani, C., & Rintayati, P. (2017). Analisis Sebaran, Dampak Dan Adaptasi Masyarakat Terhadap Banjir Rob Di Kecamatan Semarang Timur Dan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. *Jurnal GeoEco*, 3(2), 145–156.
- Indradewa, M. S. (2008). Potensi dan upaya penanggulangan bencana banjir sungai Wolowona, Nangaba dan kaliputih di Kabupaten Ende. *Tesis Magister Program Studi Ilmu Lingkungan*, 1–96.
- Kegeografian, P., & Semarang, D. I. K. (2018). Kesiap Siagaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Semarang. *Jurnal Geografi : Media Informasi Pengembangan Dan Profesi Kegeografian*, 12(1), 102–114. <https://doi.org/10.15294/jg.v12i1.8019>
- Katuuk, F. (1988). Kata Kunci: Efektivitas, Kinerja, Pemerintah, Dalam Pelayanan Publik. *Ilmu Pemerintahan*, 1–14.
- Marlina, D., & Zikri Alhadi . (2020). Kendala Pemerintah Kota Padang Dalam Menanggulangi Bencana Abrasi Sepanjang Kawasan Pantai Purus di Kota Padang. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAD)*, 9-15.

- Ridho, M. (2016). *Analisis Kesiapsiagaan Bpbd Kabupaten Aceh Barat Dalam Pengendalian Dampak Bencana Banjir Di Masyarakat Kecamatan Kaway Xvi*.
- Rob, D., Aktivitas, T., Dan, P., Di, P., & Bandarharjo, K. (2012). Dampak Rob Terhadap Aktivitas Pendidikan Dan Mata Pencaharian Di Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara. *Journal of Educational Social Studies*, 1(2). <https://doi.org/10.15294/jess.v1i2.732>
- Usman, J., & Ma, A. (2015). Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Banjir Di Kecamatan Manggala Kota Makassar. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 1(2). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/698>
- Pamungkas, C. (2004). *Tanggapan dan Antisipasi Masyarakat Menghadap Rob di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak (Studi Kasus Masyarakat Desa Bedono)*. Skripsi.
- Sari, Z. (2017). *Evaluasi Efektifitas Implementasi Program Penanggulangan Bencana Banjir Kabupaten Aceh Barat*. C001–C004. <https://doi.org/10.32315/ti.6.c001>
- Sadat, A. (2016). Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengurangan Resiko Bencana Di Kota Baubau. *Kybernan: Jurnal Studi Pemerintahan*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.35326/kybernan.v1i1.157>
- UMA. (2013). Jurnal Universitas Medan Area. *Jurnal Universitas Medan Area*, 53(1), 3–4. <http://dx.doi.org/10.1016/j.encep.2012.03.001>
- Zona, R. M., & Dasman Lanin, Z. (2019). Efektivitas kinerja BPBD Kabupaten Tanah Datar dalam Melakukan Mitigasi Terhadap Resiko Bencana Letusan Gunung Api Merapi. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*.
- Undang-Undang Nomor 24 Pasal 12 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Kebencanaan
- Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara kepada kepala dan pegawai BPBD Aceh Barat

1. Apakah BPBD Sudah baik dalam melakukan penanggulangan Bencana Banjir rob ini?
2. Bagaimana proses penanggulangan yang dilakukan oleh BPBD dalam menanggulangi bencana banjir?
3. Apakah BPBD Aceh Barat mempunyai aturan khusus ataupun prosedur tetap dalam melakukan penanganan?
4. Program apa saja yang telah dilaksanakan oleh BPBD Aceh Barat?
5. Apakah BPBD Aceh Barat sudah memberikan informasi daerah rawan bencana kepada masyarakat, kapan, bagaimana, dan apa hasil yang di dapatkan dari pemberian informasi tersebut?
6. Apakah BPBD Aceh Barat sudah menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana?
7. Apakah BPBD Aceh Barat bekerja sama dengan dinas terkait dalam menjalankan tugas serta program yang telah disusun?
8. Apakah keahlian pegawai sesuai dengan jabatan yang dipegang?
9. Bagaimana produktifitas aparat dalam melakukan penanganan bencana?
10. Bagaimana kesiapsiagaan BPBD ketika terjadi bencana banjir ?
11. Apakah BPBD sudah tepat waktu dalam penanggulangan bencana alam

12. Berapa lama BPBD Aceh Barat dalam memberikan bantuan serta pertolongan terhadap korban bencana banjir rob?
 13. Bagaimana sikap antara pimpinan kepada bawahan dalam tahap penanggulangan?
 14. Apakah strategi yang digunakan dirasa sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan?
 15. Apa saja hambatan dalam melakukan penanggulangan bencana dan bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan tersebut
- B. Wawancara kepada warga gampong pasir kecamatan johan pahlawan yang pernah mengalami bencana akibat banjir akibat pasang air laut
1. Bagaimana ketepatan waktu dari BPBD Aceh Barat dalam menanggulangi bencana ?
 2. Bagaimana efisiensi pelayanan dalam penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD Aceh Barat?
 3. Bagaimana kemandirian kerja dari BPBD Aceh Barat dalam menanggulangi bencana alam di gampong pasir kecamatan johan pahlawan?
 4. Apakah selama ini BPBD Aceh Barat telah menginformasikan daerah rawan bencana?
 5. Apakah program yang dilaksanakan oleh BPBD Aceh Barat dirasa sudah terlaksana dengan baik?
 6. Apakah bapak/ibu merasa puas dengan kinerja pegawai BPBD Aceh Barat

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara



Wawancara Bersama Buk Immilda
Kasubag Umum BPBD Aceh Barat



Wawancara dengan Bapak Erizal Efendi
Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan



Wawancara dengan Ibu Dewi Tiorita
Kabid Kedaruratan dan Logistik



Wawancara dengan Bapak Mashuri
Pembantu Kasi Kedaruratan



Wawancara dengan Abdul
Pembantu Kasi Rehabilitasi dan Rekrontuksi



Wawancara dengan Bapak Joni Aruji
Keuchik Gampong Pasir



Wawancara Bersama Saudara **Agam**
Masyarakat Gampong Pasir



Wawancara bersama saudara **Ghani**
Masyarakat Gampong Pasir

Lampiran 3 SK Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : fisisip.utu.ac.id, e-mail : fisisip@utu.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 590/UN59.5/HK.04/2020
TENTANG
PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
ATAS NAMA AJA DELLA HIKMAH NIM 1705905010038
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR
REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Mahasiswa dalam penyelesaian skripsi mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, dipandang perlu ditunjuk pembimbing skripsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65)
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA ATAS NAMA AJA DELLA HIKMAH NIM 1705905010038 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

KESATU...



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

- KESATU : Menunjuk Nodi Marefanda, M.A.P sebagai pembimbing skripsi mahasiswa nama Aja Della Hikmah NIM 1705905010038 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya, komisi pembimbing bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Teuku Umar melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar.
- KEEMPAT : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan sidang akhir skripsi mahasiswa tersebut.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada Tanggal 16 November 2020
An. REKTOR
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK

BASRI
NIP 196307131991021002

Tembusan :

1. Ketua Jurusan
2. Bendahara Pengeluaran UTU
3. Arsip

Lampiran 4 Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman fisp.utu.ac.id, e-mail : fisp@utu.ac.id

Nomor : 692/UN59.5/PT.01.05/2021

10 Juni 2021

Lampiran : -

Hal : **Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan
Pengambilan Data untuk Skripsi**

Yth;

Keuchik Gampong Pasir, Kec. Johan Paahlawan, Kab. Aceh Barat

Di

Tempat

Dengan Hormat;

Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak ibu agar memberikan izin bagi mahasiswa/ i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak ibu pimpin. Adapun mahasiswa/ i yang melakukan penelitian adalah :

Nama : Aja Dela Hikmah
NIM : 1705905010038
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
No. Hp : 085275081693
Dosen Pembimbing : Nodi Marefanda, M.AP

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapakan terimakasih.



Tembusan:

- Mahasiswa
- Arsip

Lampiran 5 Surat Pernyataan selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Beringin Maju, Meulaboh Kode Pos 23611
Telepon (0655) 7551413. Faximile (0655) 7551413.
Email: bpbdacehbarat@yahoo.co.id bpbdkab.acehbarat@gmail.com

Meulaboh, 09 Juli 2021

Nomor : 800.2/ 203 /BPBD/I/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Persetujuan Izin Wawancara
Penelitian dan Pengambilan
Data.-**

Kepada :
Yth. Dekan Universitas Teuku Umar
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Di -
Tempat

1. Sehubungan dengan surat saudara Nomor 668/UN59/.5/PT.01.05/2021, tanggal 7 Juni 2021 perihal permohonan izin wawancara penelitian dan pengambilan data untuk skripsi.
2. Berdasarkan hal tersebut diatas, kami menyetujui dan tidak keberatan untuk dilakukan wawancara dan pengambilan data keperluan penyusunan skripsi an. **Aja Dela Hikmah** dan pada tanggal 10 Juni 2021 yang bersangkutan telah melakukan penelitian dengan cara wawancara dan pengambilan data bencana.
3. Demikian kami sampaikan untuk menjadi bahan seperlunya dan terimakasih

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT
KEPALA PELAKSANA

DR. H. MUKHTARUDDIN, S. Sos. M. Si
Pembina Tk. I
Nip. 19690625 200504 1 001

Tembusan:

1. Bupati Aceh Barat;
2. Sekdakab Aceh Barat selaku kepala BPBD Kabupaten Aceh Barat (sebagai laporan);

Lampiran 6 Biodata Penulis

BIODATA

Nama : Aja Dela Hikmah
NIM : 1705905010038
Tempat/Tanggal Lahir : Pasar Lama, 11 Maret 2000
Agama : Islam
Alamat Tempat Tinggal : Desa Pasar Lama, Kecamatan Labuhan
Haji Kabupaten Aceh Selatan
Nama Orang Tua
Ayah : Said Ali
Ibu : Syarifah Aini
Alamat Orang Tua : Desa Pasar Lama, Kecamatan Labuhan
Haji Kabupaten Aceh Selatan
Pendidikan yang telah ditempuh :
- SD Negeri 6 Labuhan Haji (2005-2011)
- SMP Negeri 1 Labuhan Haji (2011-2014)
- SMA Negeri 1 Labuhan Haji (2014-2017)
Pengalaman Kerja/Organisasi
- Bendahara Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Seni (2019-2020)
- Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara
- Anggota Tim Paduan Suara Universitas Teuku Umar
- Anggota Komunitas Generasi Baru Indonesia (GenBI)